



**“ANALISIS WACANA KRITIS MAKNA PEMBANGUNAN
DALAM PIDATO KENEGARAAN SOEHARTO TAHUN 1968-
1971”**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:
ANGGARA DEWA RINGGA
3312414060

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

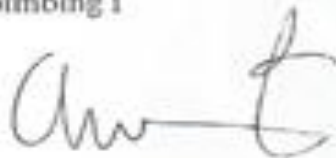
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2 Desember 2019

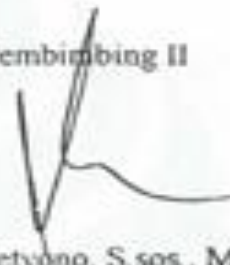
Pembimbing I



Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M

NIP. 19720724 200003 1 001

Pembimbing II

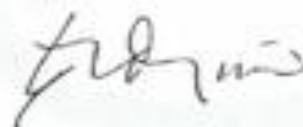


Cahyo Setyono, S.sos., M.A

NIP.19820914 201404 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Drs. Tijan, M.Si


NIP. 19621120 198702 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Januari 2020

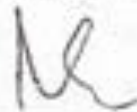
Penguji I


Dr. Suprayogi, M.Pd.
NIP.195809051985031003

Penguji II


Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M
NIP. 197207242000031001

Penguji III


Cahyo Setyomo, S.sos., M.A
NIP.198209142014041001

Mengetahui:


Dr. Moh. Saiful Mustofa, M.A.
NIP.196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini akan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 7 Desember 2019



Anggara Dewa Ringga

NIM. 3312414060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sabar Atine, Saleh Pikoléh, Sareh Tumindake.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- Ayah dan Mamah saya tercinta, sebagai motivator utama saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini
- Kepada adik – adik saya yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur ditengah kesulitan saya dalam berpikir.
- Teman – Teman **Pena Kembara dan Dosen Pembimbing** sebagai tempat saya memacu pikir serta pengetahuan saya di Bidang Akademik maupun di luar Bidang Akademik.
- Rekan Ilmu Politik 2014 sekalian yang selalu memberikan pertanyaan yang membuat saya lekas ingin menuntaskan Skripsi ini.

- Teman – Teman Pendakian saya dan Gunung – Gunung di bumi nusantara yang bisa memberikan saya semangat dan ketenangan menikmati keindahan ciptaan Tuhan.

Semoga Allah S.W.T selalu memberikan rahmat serta perlindungan kepada kalian semua. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

SARI

Ringga, Anggara. 2019. *Analisis Wacana Kritis Makna Pembangunan Dalam Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971*. Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. Dan Dosen Pembimbing II Cahyo Seftyono S.Sos., M.A. 97 Halaman

Kata Kunci : Pembangunan, Tokoh Nasional, Analisis Wacana Kritis.

Penelitian ini bertujuan memaparkan makna Pembangunan dalam pidato Kenegaraan Tokoh Nasional sekaligus Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto. Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan Indonesia memiliki pemikiran cemerlang yang menjadikan Indonesia negara dengan perkembangan Ekonomi yang stabil di angka 5-10% pada masa kepemimpinannya, pemikirannya yang cemerlang tentang pembangunan tercurahkan melalui pidato – pidato kenegaraannya di depan DPR – GR pada setiap tanggal 16 Agustus, latar belakang pembangunan dan juga strategi diungkapkan oleh Soeharto dalam pidato – pidato tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1). Makna pembangunan dalam pidato kenegaraan tahun 1968-1971?

Objek penelitian ini adalah *Pidato Kenegaraan Tahun 1968-1971*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk Analisis Wacana Kritis sebagai dasarnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Soeharto dalam pembangunan nasional ditunjukkan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan juga didasarkan pada Pembangunan Desa. Dalam pidato – pidato Kenegaraan yang diteliti menjelaskan secara langsung tentang. Ide – ide yang dimiliki Soeharto dalam melaksanakan Pembangunan dan juga hal – hal yang berkaitan dengan perubahan pandangan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia untuk bisa membantu Pembangunan Nasional mulai dari Sikap Mental, Persatuan, Politik bebas aktif agar bisa mencapai Stabilitas Politik & Stabilitas Ekonomi. Pada masa kepemimpinannya Soeharto juga memperhatikan laju ekonomi dalam negeri dengan mengatur inflasi juga nilai tukar Rupiah, aspek – aspek yang berada dalam jalur ekonomi diperhatikan oleh Soeharto untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia.

Saran dari penulis adalah Arsip data pemerintah dari tahun ke tahun agar di data dengan baik sebagai sarana bagi para peneliti untuk bisa mendapatkan data penting pemerintah dengan lebih mudah untuk penelitian yang berbasis data dari Arsip pemerintah.

Abstract

Ringga, Anggara. 2019. Critical Discourse Analysis Of Meaning Construction In The Speech Of The State Suharto Years 1968-1971. Political Science Program the Department of Politics and Citizenship. Faculty Of Social Sciences. State University Of Semarang. Supervisor I Moh. Aris Munandar, S. Sos., M. M. And Supervisor II Cahyo Seftyono S. Sos., M. A. 97 Pages

Keywords : Development, National Figures, Critical Discourse Analysis.

This research aims to explain the meaning of Development in the State speech to National Leaders as well as the 2nd President of the Republic of Indonesia Soeharto. Soeharto known as the father of Indonesia's development has good ideas that make Indonesia a country with a stable Economic development in the figure of 5-10% in the period of his leadership, his brilliant about the construction expressed through a speech – state speech in front of the DPR – GR on each of August 16, background construction and also strategy expressed by Suharto in a speech – to-speech. Rumursan the problem of this research is to (1). The meaning of development in the state speech years 1968-1971?

The object of this research is the State Speech of the Year 1968-1971. This study uses qualitative methods with a form of Critical Discourse Analysis as its basis.

The results of this study show that the thought of Soeharto in national development aimed at improving the Indonesian economy and is also based on the Development of the Village. In the speech – the speech of the State that were studied explain directly about. Ideas owned by Suharto in carrying out the Development and also things associated with the change of view that must be owned by the people of Indonesia to help the Development of the National start of Mental Attitude, Unity, free and active Politics in order to achieve Political Stability & Economic Stability. In his tenure Suharto also pay attention to the pace of the domestic economy by regulating the inflation of the Rupiah, the aspects that are in the path of the economy necessary to take into consideration by Suharto to improve the economic development of Indonesia.

Advice from the author is the data Archive of the government from year to year so that in the data very well as a means for researchers to obtain important data the government more easily to research-based data from the Archives of the government.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul *Analisis Wacana Kritis Makna Pembangunan Dalam Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971* dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang mana penulis mengharapakan safaat hingga akhir. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Terimakasih saya ucapkan kepada pihak – pihak yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Ayah dan Ibuku serta Adik – adikku yang tercinta dan juga keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta kasih sayangnya baik moril maupun materi selama menjalankan pendidikan; yang selalu memotivasi saya agar menyelesaikan studi saya
2. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial
4. Bapak Drs. Tijan, M.Si Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
5. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M dan Cahyo Seftyono, S,Sos., M.A sebagai Dosen pembimbing yang selalu memberikan saya masukan agar terselesainya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi mereka dimanapun dan kapanpun dan selalu memberikan mereka kebahagiaan

serta semoga skripsi ini mampu menjadi sebuah referensi baru bagi pihak-pihak yang bersedia mempelajarinya.

Semarang, 7 Desember 2019



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah	5
1. Pemikiran	5
2. Pembangunan	6
3. Pidato Kenegaraan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	8
A. Deskripsi Teoritis	8
1. Latar Belakang Soeharto	8
2. Teori Pembangunan	13
3. Analisis Wacana Kritis	28
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berpikir	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Latar Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Sumber Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Studi tokoh	42
E. Validitas data	43
F. Teknik Analisis Data	44
1. Interpretasi	44
2. Kesenambungan Historis	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum Tentang Soeharto	46
2. Pemikiran Soeharto	50
B. Pembahasan	72
1. Latar Belakang Pemikiran Soeharto	72
2. Dwifungsi ABRI	80
3. Agenda Pembangunan	80
4. Demokrasi	87
5. Akhir Kepemimpinan Soeharto	90
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR LAMPIRAN	100

DATAR SINGKATAN

RAPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
PELITA	: Pembangunan Lima Tahun
PJP	: Pembangunan Jangka Panjang
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
KNIL	: Koninklijke Netherlands (ch)-Indische Leger
PETA	: Pejuang Tanah Air
SD	: Sekolah Desa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
UUD	: Undang – Undang Dasar
ORBA	: Orde Baru
AWK	: Analisis Wacana Kritis
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
GOLKAR	: Golongan Karya
P4	: Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
SD	: Sekolah Desa
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
PT	: Perguruan Tinggi
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
BPS	: Badan Pusat Statistik

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Tabel Kerangka Berpikir.....	33
TABEL 4.1	Tabel Pelaksanaan Program Kerja Soeharto.....	76
TABEL 4.2	Tabel Pemikiran Soeharto	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian.....	100
Lampiran 2 Foto<i>Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971</i>.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena program – program pembangunan pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia. Dwipayana (1989:6) menuliskan Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Ibu Soeharto bernama Sukirah dan ayah Soeharto adalah seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah dan juga sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro. Dwipayana (1989:11) menuliskan ketika berumur delapan tahun Soeharto mulai bersekolah tetapi Soeharto sering berpindah – pindah sekolah. Awalnya Soeharto sekolah di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean kemudian Soeharto pindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke Kemusuk, Kidul. Setelah itu kemudian ayah Soeharto, Kertosudiro memindahkan Soeharto ke Wuryantoro.

Soeharto merupakan Presiden yang merencanakan pembangunan nasional dengan nama Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Jangka Panjang pada masa Orde Baru. Dikenal sebagai Jenderal Besar Republik Indonesia yang berhasil memimpin Agresi Militer Belanda di Yogyakarta tahun 1948 dan Operasi Militer di Irian Barat 1961 atau dikenal sebagai Operasi Trikora. Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia dengan program – program pembangunan di masa jabatannya sebagai presiden ke-2 Republik

Indonesia, pada masa kepemimpinannya program pembangunan nasional mulai dilaksanakan, program – program pembangunan seperti Pembangunan Lima Tahun dan juga Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Nasional yang di usung oleh Soeharto didasari oleh keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa awal kepemimpinannya sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia. Pada masa awal jabatannya sebagai Presiden ke-2 kondisi ekonomi dan juga keamanan negara dalam keadaan yang kurang baik dengan krisis ekonomi dikarenakan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras potensi ekonomi Indonesia karena digunakan untuk membiayai proyek – proyek politik pemerintah. Menurut data Bank Indonesia (BI) dalam “History of Monetary Period 1959-1966”, sepanjang periode 1960-1965, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah. Laju inflasi teramat tinggi hingga mencapai 635 persen pada 1966. Selain itu juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 menjadikan keadaan Sosial, Politik, Ekonomi di Indonesia semakin berada pada titik membahayakan.

Soeharto sebagai presiden ke-2 Republik Indonesia memikirkan cara agar Indonesia mampu berkembang menjadi negara maju pada masa depan. Program Pembangunan Lima Tahun dan juga Pembangunan Jangka Panjang menjadi langkah – langkah untuk mencapai target Soeharto agar rakyat Indonesia Sejahtera.

Pembangunan Nasional dilakukan dalam berbagai bidang, mencakup hampir seluruh bidang, mulai dari infrastruktur, aturan, hingga pembangunan

masyarakat Indonesia. Pembangunan dilakukan Soeharto dengan modal pinjaman dari World Bank, IMF yang tergabung dalam IGGI menemui angka sekitar US\$ 1,04 miliar dan juga bantuan dari AS secara langsung mencapai US\$ 1,03 miliar (USAID, 1971).

Pembangunan Nasional Indonesia menjadi salah satu pembangunan berskala besar yang berhasil meningkatkan ekonomi hingga 8%, pembangunan nasional yang dilaksanakan pada masa orde baru ini mulai diberitahukan kepada Anggota DPR-GR pada tahun 1968 dalam bentuk Pidato Kenegaraan 1968 di Depan Anggota DPR-GR. Setelah Pidato Kenegaraan ini disampaikan oleh Soeharto, pembangunan mulai dilaksanakan pada tahun selanjutnya 1969. Hingga pada setiap tahun berikutnya pembahasan tentang pembangunan disampaikan pada setiap kesempatan Pidato Kenegaraan Soeharto di Depan Anggota DPR-GR.

Soeharto melakukan pembahasan tentang Pembangunan Nasional dalam Pidato Kenegaraan di depan Anggota DPR-GR pada tahun 1968-1971 dikarenakan hal yang berkaitan dengan Pembangunan Nasional dinilai penting oleh Soeharto sebagai salah satu cara untuk menyelaraskan Pemerintah dan juga Legislatif pada masa itu. Pidato yang dilakukan oleh Soeharto dalam kurun waktu 1968-1971 adalah pidato yang mendasari pembangunan yang dilaksanakan dalam masa Orde Baru.

Pembahasan mengenai teknis dan juga target pembangunan disampaikan dalam pidato – pidato tersebut meliputi (1). Dasar pembangunan Indonesia yang berbasis desa, (2). Persatuan yang harus digalang seluruh elemen

masyarakat demi melancarkan pembangunan nasional (3). Stabilitas Ekonomi yang dimaksudkan untuk menjaga inflasi dan (4). Stabilitas politik yang dihimbau oleh Soeharto sebagai syarat agar laju politik tidak mengganggu pembangunan nasional. Hasil dari pembangunan dari setiap tahun juga disampaikan Oleh Soeharto dalam kesempatannya menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan Anggota DPR-GR pada tanggal 16 Agustus.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi pustaka menggunakan Analisis Wacana Kritis dengan judul “Analisis Wacana Kritis Makna Pembangunan dalam Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Soeharto tentang Pembangunan Nasional dalam pidato Kenegaraan Tahun 1968-1971?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pemikiran Soeharto tentang Pembangunan Nasional dalam Pidato Kenegaraan Tahun 1968-1971.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menambah dan memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan khususnya dalam lingkup Pemikiran Politik Indonesia.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain yang berkeinginan melakukan penelitian dengan tema pemikiran politik.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan informasi bagi masyarakat sebagai bahan perbandingan dalam memahami pemikiran Soeharto.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul ini maka perlu diberikan batasan yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan persepsi atau penafsiran antara pembaca satu dengan yang lain dan antara pembaca dengan penulis.

1. Pemikiran Kritis

Pemikiran kritis bersifat “kritis” maksudnya adalah bahwa pemikiran ini bertujuan mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial, termasuk hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tak sepadan. Selain itu menurut Santrock (2011: 359), pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif, serta melibatkan evaluasi bukti. Dengan penjelasan tersebut

maka yang dimaksud Pemikiran Kritis dalam penelitian ini adalah sebuah upaya pengungkapan suatu pernyataan maksud tersembunyi dari subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pemikiran kritis juga digunakan untuk mengkritik dan mengungkap hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan.

2. Pembangunan

Dalam studi ini, konsep pembangunan menjadi pembahasan utama, pembangunan politik memiliki beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya Surbakti (1992:238). Selain itu Sukirno (1985:13) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Batasan ilmiah dengan penjelasan tersebut yang dimaksud pembangunan dalam penelitian ini adalah Pembangunan berskala Nasional yang meliputi pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, politik, dan budaya.

3. Pidato Kenegaraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pidato Kenegaraan adalah pidato Kepala Negara di depan DPR/MPR atau pidato resmi sebagai Kepala Negara, menurut penjelasan tersebut Pidato Kenegaraan

dalam penelitian ini adalah Pidato Presiden Soeharto di depan MPR/DPR pada tanggal 16 Agustus 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Latar Belakang Soeharto

Mantan Presiden Kedua Indonesia serta bapak pembangunan ini dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Dwipayana (1989:6) dalam bukunya menuliskan Ibu dari Presiden Soeharto bernama Sukirah dan ayah Presiden Soeharto yang merupakan seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah dan juga sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro. Dwipayana (1989:11) mencatat ketika berumur delapan tahun Soeharto mulai bersekolah tetapi Soeharto sering berpindah-pindah sekolah. Awalnya Soeharto sekolah di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean kemudian Soeharto pindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke Kemusuk, Gunung Kidul. Setelah itu kemudian ayahnya Kertosudiro memindahkan Soeharto ke Wuryantoro.

Dwipayana (1989: 28) menuliskan bahwasanya beliau (Soeharto) kemudian dititipkan dan tinggal bersama Prawirohardjo seorang mantri Tani. Pada tahun 1941 tepatnya di Sekolah Bintara, Gombang di Jawa Tengah, Soeharto terpilih sebagai Prajurit Teladan, sejak kecil Soeharto memang bercita-cita menjadi seorang tentara atau militer dari masa kecilnya Soeharto yang serba kekurangan, ia mempelajari bahwasanya kekuatan politik saja tidak sudahlah cukup untuk bisa membuat

masyarakat Indonesia bisa maju dan berkembang, oleh karena itu peran dari ekonomi harus diperbaiki dan menjadi senjata utama untuk meningkatkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Setelah Indonesia merdeka, Soeharto kemudian resmi sebagai Tentara Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, yakni pada lahirnya “Tentara Keamanan Rakyat”.

Dalam bidang militer Soeharto memulainya dengan pangkat Sersan tentara KNIL, dari situ Soeharto kemudian menjadi anggota PETA pada zaman penjajahan Jepang sebagai *Chudancho* atau Komandan Kompi, setelah itu Soeharto menjabat sebagai komandan resimen berpangkat Mayor kemudian menjabat komandan Batalyon dengan pangkat Letnan Kolonel.

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949, itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan bangsa Belanda selama tiga setengah abad. Dwipayana (1989:57) mencatat pada peristiwa ketika merebut Yogyakarta yang waktu itu sebagai Ibukota Republik Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret Soeharto yang kala itu menjabat Letnan Kolonel memimpin pertempuran secara langsung.

Tujuan dari Serangan Umum 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) ketika itu dalam membela Bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya,

Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkeraman penjajah Belanda pada waktu itu. Pada waktu itu Soeharto juga menjadi pengawal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda ketika itu Soeharto yang menjadi panglima Mandala yang dipusatkan di Makassar.

Ketika peristiwa G-30-S/PKI meletus pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat ketika itu. Kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta oleh PKI. Setelah peristiwa G-30-S/PKI, Soeharto kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Jendral Ahmad Yani yang gugur di tangan PKI. Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, Soeharto juga menjabat sebagai Pangkopkamtib yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu.

Puncak karier Soeharto ketika Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal sebagai "Supersemar" oleh Presiden Soekarno pada bulan maret 1966 dimana tugasnya adalah mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran Besar Revolusi Bung Karno. Setelah peristiwa G-30-S/PKI keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk, kemudian pada bulan maret 1967 dalam sidang istimewa MPRS yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia yang menggantikan Presiden

Soekarno, dimana pengukuhan dilakukan pada Maret 1968. Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru dimana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden Soeharto. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru bahkan sebagian yang terkait atau masih pendukung dari Partai PKI dihabisi dengan cara dieksekusi massal di hutan oleh militer pada waktu itu. Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.

Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Program

stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Dan pemerintahan Soeharto berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakannya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.

Pasca berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang.

Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik

sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.

2. Teori Pembangunan

Adrian Leftwich (2000:17) mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis (development as historical progress), pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam (development as the exploitation of natural resources), pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, dan (kadang kala) sosial, dan politik yang direncanakan (development as the promotion of planned of economic, and (sometimes) social and political advancement); pembangunan sebagai suatu kondisi (development as a condition); pembangunan sebagai suatu proses (development as a process); pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (development as economic growth); pembangunan sebagai perubahan struktural (development as structural change); pembangunan sebagai modernisasi (development as modernization); dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi (development as an increase in the forces of production).

(Sukirno 1985:13) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Rostow (1960) membagi proses pembangunan dalam lima tahap sebagai berikut:

a. Tahap Masyarakat Tradisional, masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1). Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian.

(2). Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis dimana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang.

(3). Kebijakan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

- b. Tahap Prasyarat Lepas Landas, pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri yaitu:
- (1). Tahapan yang dicapai oleh negara-negara se Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada;
 - (2). Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (born free) yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.
- c. Tahap Lepas Landas, ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu:
- (1). Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto.
 - (2). Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi
 - (3). Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan:
 - (4). Segala gejala-gejala untuk membuat perluasan di sektor modern;
 - (5). Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi.

- d. Tahap Menuju Kematangan, pada tahap ini keadaan perekonomian yang terus menerus bertumbuh meskipun kadang – kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan – kegiatan perekonomian, timbul industri – industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama. Sehingga barang – barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri.
- e. Tahap Konsumsi Tinggi, pada tahap konsumsi tinggi ini pendapatan riil perkapita meningkat sampai pada suatu titik dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang – barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Rostow juga menyebutkan ada tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain
- b. Menciptakan suatu welfare state yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif.

- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.

Dalam studi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik, yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Surbakti (1992:238) menjelaskan Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya. Perubahan politik dapat diartikan terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik pada periode tertentu ke periode lain atau dari sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Persoalannya ialah, apakah perubahan itu bersifat progresif, yaitu menuju situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, atau bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya.

Bedasarkan contoh dapat dilihat pada masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter pemerintahan era reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan situasi politik yang lebih demokratis daripada sebelumnya.

Konsep pembangunan mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan.

Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sarannya antara lain mengembangkan kapasitas –

kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

Inglehart dan Welzel (2005:3) menyatakan bahwa modernisasi membawa sedampak pengaruh bagi perubahan tatanan sosial di masyarakat, Modernisasi dalam sosio ekonomi membawa kemampuan objektif yang membuat manusia menjalani hidup mereka berdasarkan pilihan individual. Menekankan nilai – nilai ekspresi diri yang kemudian menyebar ke hampir sebagian besar bidang kehidupan. Perkembangan sosio ekonomi lebih jauh memberikan pengaruh besar pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat, budaya, dan politik, karena memberikan cara pandang baru pada manusia dalam melihat dunia. Dengan demikian dapat dipahami perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, kekuasaan dan strategi kebijaksanaan umum.

Pembangunan Nasional di era Soeharto yang memiliki latar belakang ekonomi dijelaskan oleh Jamaludin A.N dalam buku Sosiologi Pembangunan mengenai pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi menurut Jamaludin (2016:10-13) sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi berfungsi dalam rangka mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kehidupun bangsa dan

negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah proses upaya yang dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapat nasional.

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Adapun pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan nilai produksi, melainkan juga terdapat perubahan dalam struktur produksi, alokasi pembiayaan, dan jenis alat produksi yang digunakan. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

a. Sumber daya alam.

Memang sangat diakui bahwa sumber kehidupan manusia hampir dapat dikatakan bersumber dari alam, kekayaan alam, kesuburan tanah, kondisi iklim atau cuaca, potensi hutan, potensi

tambang, potensi laut, dan sebagainya, yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara yang bersangkutan, terutama ketersediaan bahan baku produksi sehingga proses pengolahannya senantiasa berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber daya manusia

Salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah melalui jumlah dan kualitas penduduk atau manusia. Jumlah penduduk atau manusia yang besar merupakan pasar potensial untuk dijadikan sasaran memasarkan hasil-hasil produksi yang telah dilakukan, sementara kualitas penduduk atau manusia sangat menentukan seberapa besar produktivitas yang dapat dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, terutama manfaatnya kepada bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya.

c. Permodalan.

Sumber daya modal yang memadai merupakan faktor penunjang dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sumber daya modal sangat dibutuhkan suatu bangsa, negara, pemerintahan, untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah

kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

d. Lapangan kerja.

Pengangguran karena tidak tersedianya lapangan kerja merupakan masalah utama terhadap pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Sebaliknya, ketersediaan lapangan kerja bagi pencari kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara yang bersangkutan.

e. Keahlian atau kewirausahaan.

Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi sehingga bisa langsung digunakan masyarakat sangat diperlukan keahlian atau kemahiran untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sekalipun demikian, masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa yang memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan, tidak akan menyelesaikan masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat tercapai apabila masyarakat memiliki keahlian pada bidang tertentu dan memiliki jiwa kewirausahaan.

f. Kestabilan politik.

Kondisi politik suatu negara yang berubah – ubah sulit untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan kestabilan politik merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa.

g. Kebijakan pemerintah.

Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi kebijakan pemerintah turut memegang peranan. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung aktivitas di bidang ekonomi sudah pasti mengalami kemerosotan pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Demikian pula sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah itu mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan akan dapat berlangsung dengan baik.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia telah banyak memberikan kemajuan, baik di bidang kehidupan fisik maupun nonfisik. Akan tetapi, pada kenyataannya, kondisi perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan internal, terutama yang berkaitan pada bidang pasar finansial dan pasar komoditas. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata secara adil antar

daerah ataupun antar kelompok sosial ekonomi. Etika perekonomian senantiasa menekankan pada persepsi secara kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini ataupun mendatang, tetapi juga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh semua anggota masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Fondasi moral kebijakan pembangunan ekonomi harus dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan Pembangunan Nasional pemerintah juga tidak lupa untuk melakukan pembangunan sosial untuk menyelaraskan masyarakat dengan pembangunan nasional. Jamaludin (2016:15-16) juga menjelaskan dalam bukunya berjudul Sosiologi Pembangunan merupakan dimana bertujuan utama pembangunan di bidang sosial (social development) adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya, maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan pemikiran dan tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial.

Secara kontekstual, pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi dinikmati sekelompok kecil orang saja. Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial, mencakup pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, dengan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Program pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, rasional, efektif, dan efisien, yang sasaran utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat atau manusia Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia yang mengisyaratkan bahwa untuk terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah melalui usaha pembangunan sosial.

Pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan ataupun secara kolektif atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan – kekuatan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antara individu, kelompok, dan lembaga – lembaga sosialnya. Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk pemenuhan kesejahteraan sosial menjadi isu secara nasional. Asumsinya bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan tidak lagi dilihat hanya meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi karena kemampuan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial ataupun korban bencana alam dan sosial.

Selanjutnya Jamaludin A.N juga menjelaskan Pembangunan Politik yang dimana Pemerintahan Orde Baru juga melaksanakannya menurut Jamaludin (2016:13-15) menjelaskan bahwa Pembangunan di Bidang Politik merupakan konfigurasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik yang dilakukan oleh para evaluator bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu aktivitas di bidang pembangunan sehingga fenomena yang tergambar dalam kehidupan masyarakat dalam

sebuah negara atau bangsa mengharuskan terciptanya dua jenis kekuatan. Pertama, kekuasaan yang dilakukan oleh kaum politisi bahwa untuk menetapkan suatu kebijakan dalam pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan lebih banyak diwarnai atau ditentukan oleh kemauan atau kekuasaan politik. Kedua, kekuatan yang tercipta atas ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kaum birokrasi yang mengatasnamakan publik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi sesungguhnya lebih berorientasi pada memenuhi desakan atau tuntutan kebutuhan ataupun keinginannya sendiri.

Pembangunan di bidang politik senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan ideologi pembangunan, bahkan lebih diperkuat yang tujuan dan sasarannya bahwa semua manfaat dari hasil pembangunan pada akhirnya akan diperluas pada semua sektor dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang kita pahami sebagai argumentasi kesejahteraan atau manfaat diteteskan ke bawah (*trickle down effect*) sehingga melahirkan ungkapan bahwa perusahaan besar memiliki kewajiban mengasuh perusahaan kecil, orang kaya mengasuh orang miskin, dan sebagainya.

Apabila kita memerhatikan hasil kajian dan pengalaman dari berbagai pihak, jelas bahwa pernyataan politik terhadap kepentingan masyarakat pada kenyataannya hanya merupakan topeng. Hal tersebut disebabkan tujuan utamanya adalah memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Orientasi pembangunan politik seperti ini tidak mensejahterakan masyarakat, tetapi justru semakin menyengsarakan masyarakat dalam kemiskinan, terutama mereka pada masyarakat pada level bawah secara individual. Kenyataan ini dijadikan isu sentral bagi partai politik untuk menciptakan propaganda kepada golongan masyarakat tersebut dalam menjalankan aksi politiknya.

Para pimpinan jabatan politik yang bersumber dari partai politik tidak lagi memiliki hati nurani yang memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, tetapi justru memanipulasi kepentingan masyarakat sehingga pemikiran dan tindakannya lebih berorientasi untuk memenuhi kepentingan pribadi masing – masing. Untuk itu, pembangunan pada bidang politik seharusnya diarahkan pada sasaran berikut ;

- d. Mendorong kesadaran para elite politik agar sejalan dengan anjuran konstitusi karena konstitusi tersebut merupakan produk dari pejabat politik dan jabatan publik. Dengan kata lain, konstitusi hasil komitmen (kesepakatan) seluruh pejabat politik dan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menciptakan atau mengamandemen konstitusi merupakan salah satu aspek kegiatan dalam pembangunan politik untuk mendorong kesadaran pejabat politik, pejabat publik, ataupun para elite politik
- e. Menciptakan kecerdasan para elite politik. Pembangunan politik diharapkan dapat melahirkan para elite politik yang

memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk melakukan negosiasi dan berkolaborasi, baik secara internal maupun secara eksternal sehingga suatu saat, seluruh pejabat dalam jabatan politik memiliki kecerdasan dan kemampuan dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

f. Menciptakan pengetahuan masyarakat agar mampu menetapkan pilihan yang tepat. Pembangunan politik yang tepat sangat diharapkan untuk dapat menciptakan pengetahuan masyarakat dalam menetapkan pilihan, ketika saatnya tiba memilih pejabat – pejabat politik yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

g. Memahami hakikat demokrasi. Kecenderungan penyelenggaraan kekuasaan negara dan bangsa lebih banyak memilih ajaran demokrasi. Dengan adanya pembangunan politik, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang demokrasi. Dengan demikian, dalam menentukan pilihannya, rakyat tidak mengalami kesalahan yang dapat menyengsarakan dirinya sendiri. Dengan adanya pemahaman dan pengertian para anggota masyarakat terhadap betapa pentingnya keberadaan politik dalam negara atau bangsa, kebijakan negara pada masa mendatang, yang tujuan dan sasaran utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis menurut Darma (2009:49) merupakan sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberikan kejelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial, dominasi, dan kepentingan yang direproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik mempunyai tujuan dan asumsi. Tujuan analisis wacana kritis menurut Darma (2009:53) adalah untuk mengembangkan asumsi – asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung dibalik kata – kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan. Analisis wacana kritis bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis tentang keterkaitan antara praktik – praktik diskursif, teks, peristiwa, dan sosio kultural yang lebih luas. Darma (2009:57) mengemukakan delapan prinsip tentang analisis wacana kritis, yaitu (1) AWK membahas problem-problem sosial. Jadi, fokusnya bukan pada pemahaman bahasa semata, tetapi lebih banyak karakteristik dari proses dan struktur kultural.

Dengan demikian, AWK akan berspekulasi dalam mengidentifikasi karakteristik linguistik dari proses dan struktur kultural itu sendiri. (2) Hubungan kekuasaan bersifat diskursif (berwacana), artinya fokus wacana sama dengan fokus bagaimana kekuasaan dibahasakan. (3) Wacana berwujud sebagai masyarakat dan budaya, dalam arti wacana tidak sekadar

refleksi hubungan – hubungan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari relasi itu dan menyelami reproduksi melalui hubungan dialektis. (4) Wacana itu berideologi. Ideologi sebagai representasi dan konstruksi masyarakat, yang di dalamnya pasti ada dominasi dan eksploitasi seringkali diproduksi lewat wacana. (5) Wacana bersifat historis. AWK seharusnya mengkaji wacana dalam konteks historisnya dengan melihat ketersambungan dengan wacana sebelumnya. (6) AWK perlu menggunakan pendekatan sosio kognitif untuk menjelaskan bagaimana hubungan – hubungan teks dan masyarakat dijalani dalam proses produksi dan pemahaman. (7) AWK bersifat interpretatif dan eksplanatif serta menggunakan metodologi yang sistematis untuk menghubungkan teks dan konteksnya. (8) AWK adalah sebuah paradigma saintifik yang memiliki komitmen sosial yang terus – menerus berusaha larut dan mengubah apa yang sedang terjadi dalam sebuah konteks. AWK akan berusaha agar ada perubahan dalam sikap, apresiasi, dan interpretasi pembaca terhadap teks yang dibacanya. Fokus perhatiannya ditujukan pada peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan tatanan sosial dan perubahan sosial. Analisis wacana kritis bersifat “kritis” maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial, termasuk hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tak sepadan. Analisis wacana kritis tidak bisa dianggap sebagai pendekatan yang secara politik netral, namun sebagai pendekatan kritis yang secara politik ditujukan bagi timbulnya perubahan

sosial yang memihak pada kelompok – kelompok yang tertindas. Oleh sebab itu, tujuannya adalah agar bisa memberi kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan dalam proses komunikasi dan masyarakat secara umum.

Kridalaksana (2008:231) menjelaskan wacana yaitu satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya pengungkapan suatu pernyataan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. Analisis wacana kritis juga digunakan untuk mengkritik dan mengungkap hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Wacana tidak hanya dilihat dari aspek kebahasaannya saja, tetapi juga bagaimana hubungan antara bahasa dengan konteks tertentu, termasuk didalamnya tujuan tertentu dari praktik kekuasaan. Analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial dan ketimpangan yang direproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik Darma (2009:50).

a. Dalam Paradigma Kritis

Analisis wacana dalam paradigma kritis merupakan suatu upaya untuk melihat secara dekat bagaimana makna pesan yang diorganisasikan, digunakan, dan dipahami. Dalam ranah politik, analisis wacana kritis merupakan suatu praktek pemakaian bahasa, terutama dalam praktik kekuasaan. Karena

bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek. Paradigma kritis memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah merupakan suatu hal yang netral. Realitas kehidupan sosial dipengaruhi oleh berbagai kekuatan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Konsentrasi analisis pada paradigma kritis adalah menemukan kekuatan yang dominan tersebut dalam memarjinalkan dan meminggirkan kelompok – kelompok yang lain yang tidak dominan. Bahasa dalam wacana kritis dipandang sebagai representasi yang membentuk subjek, tema, maupun ideologi tertentu. Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai faktor yang penting, bahasa tersebut digunakan dalam melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat.

4. Analisis Wacana Kritis (AWK)

Darma (2014:107-108) Adapun karakteristik wacana kritis tersebut dijelaskan seperti pemaparan di bawah ini;

a. Historis

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satunya aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu.

Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis dimana teks itu diciptakan.

b. Kekuasaan

Dalam tahap ini, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Seperti kekuasaan laki – laki dalam wacana seksisme, kulit putih dan kulit hitam dalam wacana mengenai rasisme. Dalam wacana kritis tidak ada pembatas diri pada detil teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya tertentu. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana sangat penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Kontrol disini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental atau psikis dan biasanya dengan menggunakan akses seperti ; pengetahuan, uang, dan pendidikan. Selain konteks, kontrol juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar bukan hanya menentukan bagian mana yang harus ditampilkan dan mana yang tidak, tetapi juga bagaimana Soeharto harus ditampilkan dan bisa juga dilihat dari penonjolan atau emakain kata – kata tertentu.

c. Ideologi

Teori – teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegimitasi dominasi, dengan jalan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken of granted*. Wacana dalam hal ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok dominan mempersuasi (bujukan) dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan benar.

Karakteristik tersebut menggambarkan wacana sebagai praktik sosial yang menyebabkan suatu hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya serta menampilkan efek ideologi yang ada. Berdasarkan kelima karakteristik wacana di atas, dapat dipahami bahwa wacana terkait dengan berbagai aspek yang berada sebagai latar belakangnya. Wacana erat kaitannya dengan tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Artinya, dalam suatu bangunan wacana yang dibangun oleh Abdurahman Wahid dalam teks pidato kepresidenannya, terdapat pula aspek – aspek yang melatar belakanginya.

Berdasarkan analisis wacana dapat melihat aspek – aspek yang terkait dan mempengaruhi wacana tersebut terbentuk. Dalam hal

ini, teks pidato yang terbentuk atas wacana yang ada merupakan aspek yang ditelisik melalui penelitian ini. Wacana merupakan suatu elemen yang kemudian menghasilkan berbagai produk, salah satunya dapat berupa ideologi. Melalui wacana yang dibangun, dapat terbentuk suatu makna ideologi dan kekuasaan tertentu. Dengan kata lain ideologi dan kekuasaan bisa diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur bahasa yang dipakai.

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak semata – mata dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, memang analisis wacana kritis menggunakan bahasa dalam teks yang dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis dalam analisis wacana kritis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa yang dianalisis oleh analisis wacana kritis bukan menggambarkan aspek bahasa saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini berarti bahasa dipakai untuk tujuan tertentu termasuk di dalamnya praktek kekuasaan.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian mengenai analisis wacana kritis teks tertulis sudah banyak ditemukan dalam kepustakaan di Indonesia. Bahkan, penulisnya tidak hanya dari Indonesia saja namun juga penulis asing banyak yang juga telah membahas masalah tersebut dalam tulisan mereka baik berupa buku, jurnal

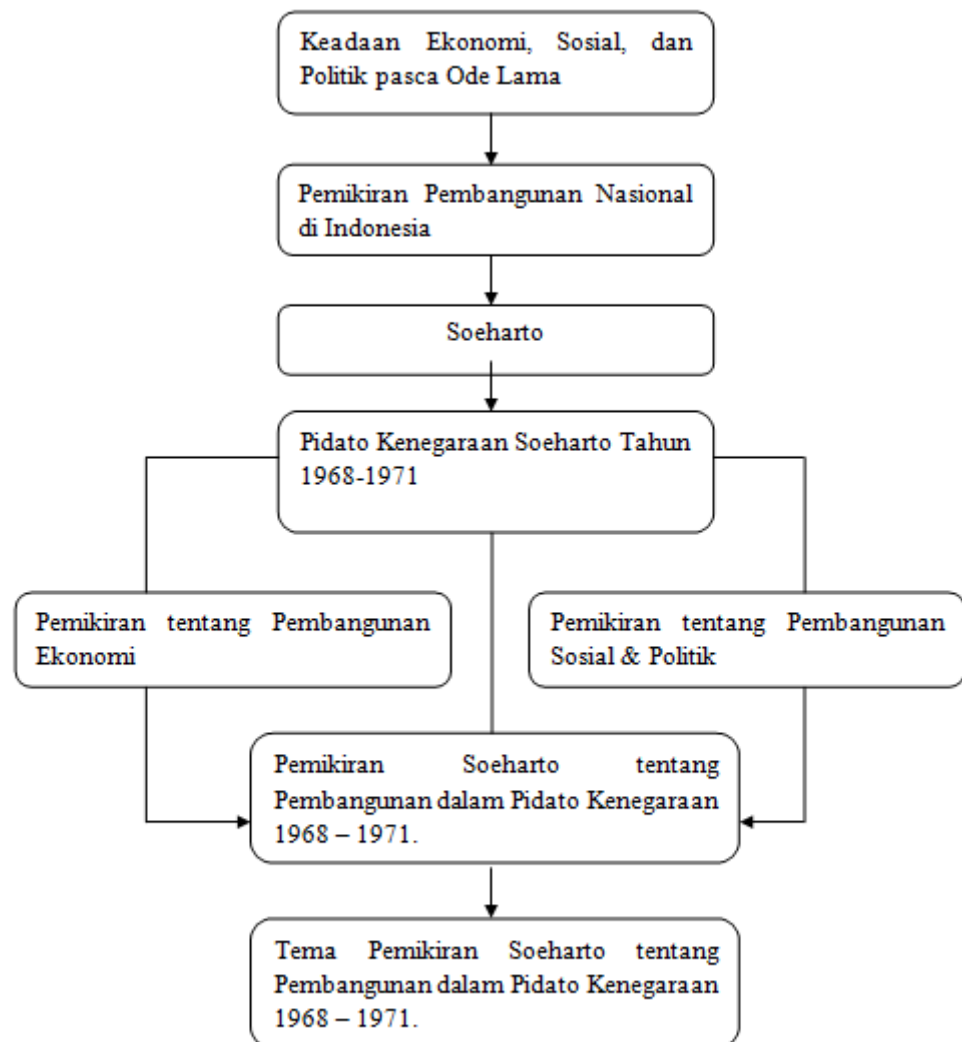
maupun skripsi. Kajian pustaka yang mengupas secara menyeluruh tentang pemikiran Soeharto tentang pembangunan yang kompleks masih cukup mudah untuk ditemukan.

Dibawah ini penulis menyajikan beberapa kajian yang relevan terkait dengan judul yang diajukan.

1. Diorezky Yoga Pratama, 2015, "*Analisis Wacana Ideologi Pembangunan Analisis Wacana Kritis Buku Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia*". Skripsi.
 - a. Persamaannya dengan penelitian ini yang pertama adalah membahas tokoh yang sama, juga dengan tema pemikiran Tokoh. Kedua adalah, penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Wacana Kritis.
 - b. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Pratama lebih ditekankan pada kekuasaan dan juga ingin mengungkap hegemoni juga dominasi ABRI di Indonesia.
2. Beti Winanjar, 2014, "*Analisis Wacana Kritis Berita Sosial dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat*". Skripsi
 - a. Persamaannya dengan penelitian ini yang pertama adalah membahas tema yang sama terkait dengan teks dan juga wacana, yang kedua adalah kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

- b. Perbedaannya dengan Penelitian ini adalah tema yang diambil berbeda dan menekankan terhaap surat kabar dan politik saja. Tidak mencangkup unsur yang lain.
3. Arsitta Aghniya, 2014, *Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemeritaan Klarifikasi Kasus Tertangkapnya PWNNU Dalam Razia Penyakit Masyarakat di Harian Radar Banten*. Skripsi.
- a. Persamaanya dengan penelitian ini adalah menggunakan Analisis Wacana Kritis.
 - b. Perbedaannya adalah tema dan tokoh yang diteliti berbeda.
4. Budi Gunawan, 2015, *Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Pada Harian Surat Kabar Kompas*. Sripsi.
- a. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan Analisis Wacana Kritis.
 - b. Perbedaannya dengan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi menjelaskan tentang tema yang berbeda.

C. Kerangka Berpikir



Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan yang dilakukan Orde Baru disaat keadaan ekonomi, sosial dan juga politik pada masa pasca Orde Lama, pembangunan pada masa Orde Baru tidak langsung dilakukan mulai dari awal kepemimpinan Soeharto tetapi dimulai pada tahun 1969 dan rencana diungkapkan oleh Soeharto pada kesempatan memberikan Pidato Kenegaraan pada tahun 1968. Hal tersebut kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan

mengkaitkannya dengan pembangunan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Lalu, penulis menemukan bahwa awal – awal ide dan juga strategi pembangunan selama kepemimpinannya sudah mulai diungkapkan dalam Pidato Kenegaraan pada tahun 1968-1971.

Pemikiran – pemikiran Presiden Soeharto dituangkan dalam Pidato Kenegaraan yang dilakukan setiap tahun di depan DPR-GR. Untuk mengetahui pemikiran – pemikiran Soeharto tersebut maka penulis harus mengumpulkan data – data berbentuk Pidato Kenegaraan Soeharto di depan DPR-GR pada tahun 1968-1971, yang dalam pidato – pidato tersebut berisi ide – ide awal tentang pembangunan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru sepanjang berjalannya masa kepemimpinan Soeharto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penelitian yang baik harus memiliki suatu metode yang membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti. Agar hasil penelitian yang diperoleh dapat digolongkan sebagai penelitian ilmiah. Dengan demikian untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam bab ini akan diuraikan tentang teknik pengumpulan data hingga analisis data yang akan membantu berjalannya penelitian ini. Penelitian ini membahas analisis wacana kritis yang terdapat dalam Pidato Kenegaraan Soeharto di depan DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 1968-1971. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data berupa wacana yang terdapat pada Pidato Kenegaraan Soeharto 1968-1971. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Moleong (1994:6) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu objek penelitian yang berupa kutipan data sebagai gambaran penyajian laporan penelitian. Penelitian kualitatif sebagai penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif - eksklusif atau masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan Moleong (2007: 94). Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

Buah pemikiran tentang pembangunan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan tahun 1968-1971.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari Pidato Kenegaraan Soeharto, literatur berupa tulisan mengenai Soeharto, baik yang ditulis oleh Soeharto sendiri maupun tulisan orang lain tentang Soeharto. Data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan mampu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu ;

1. Data Primer, adalah data utama yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971.

2. Data Sekunder, adalah data – data yang digunakan untuk menguatkan data utama. Data – data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah Karya dan tulisan orang lain tentang Soeharto berupa Buku – buku, artikel ilmiah, arsip/dokumen dan bahan referensi lainnya.

Data – data relevan maupun referensi lainnya yang berkaitan erat dengan tema yang diangkat oleh penulis. Data bisa berupa buku – buku, artikel, tulisan – tulisan yang bersifat ilmiah lainnya. Data yang dikumpulkan oleh penulis kemudian dikelompokkan sebelum dianalisis. Pengelompokan ini berkaitan dengan tema yang akan di bahas yaitu Soeharto dan Pembangunan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan data Primer dan Sekunder yang berupa Pidato Kenegaraan Tahun 1968-1971 ataupun berupa arsip/dokumen, buku – buku yang memuat atau membahas tentang Soeharto. Karya dan tulisan orang lain tentang Soeharto berupa Buku – buku, artikel ilmiah, arsip/dokumen dan bahan referensi lainnya. Dengan membaca dan menelaah sumber literatur khususnya karya – karya atau pun tulisan Soeharto yang berkaitan dengan tema penelitian. Data dan Informasi yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data kemudian di olah dan dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

1. Studi Tokoh

Harahap (2011:48) menyatakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dilakukan dengan mengumpulkan kepustakaan yaitu dikumpulkannya pidato – pidato Kenegaraan tokoh yang bersangkutan.

E. Uji Validitas Data

Darma (2009:161) menyatakan analisis wacana harus menyerakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan.

Harahap (2011:53) Dalam melakukan analisis dilihat benang merah yang menghubungkan pemikiran – pemikirannya, baik lingkungan historis dan pengaruh – pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri, karena seorang tokoh adalah anak zamannya. Untuk melihat latar belakang internal, diperiksa riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir – pemikir sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Demikian juga diperhatikan perkembangan intern dalam tahap – tahap pemikirannya. Untuk melihat latar belakang eksternal, diselidiki keadaan khusus zaman yang dialami tokoh, dari segi ekonomi politik budaya dan intelektual.

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2007:176) menyatakan untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data, data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Meninjau data Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971 dari Arsip Nasional

F. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen hingga sampai pada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapat kesimpulan sementara, kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data akan dipahami dan dikomentari yang pada akhirnya akan mendeskripsikan atau menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Beberapa metode yang digunakan dalam analisis data penelitian tokoh :

1. Interpretasi

Harahap (2011:49-50) Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. Interpretasi merupakan landasan bagi *hermeneutika*. Ziygmunt

Bauman menjelaskan bahwa hermeneutik adalah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan dan tulisan yang tidak jelas, kabur, remang – remang, dan kontradiksi, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan pendengar atau pembaca. Dalam suatu interpretasi, penulis menggunakan Emik dan Etik. Emik adalah data – data, kalimat – kalimat dan teks, sebagaimana dipahami pemikir yang merupakan perumusan kalimat seorang tokoh terhadap masalah yang dipahaminya. Sedangkan Etik adalah pemahaman penulis sendiri terhadap pemikiran (data, kalimat, teks dan rumusan) tokoh yang diteliti.

2. Kesenambungan historis

Harahap (2011:53) Dalam melakukan analisis dilihat benang merah yang menghubungkan pemikiran – pemikirannya, baik lingkungan historis dan pengaruh – pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri, karena seorang tokoh adalah anak zamannya. Untuk melihat latar belakang internal, diperiksa riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir – pemikir sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Demikian juga diperhatikan perkembangan intern dalam tahap – tahap pemikirannya. Untuk melihat latar belakang eksternal, diselidiki keadaan khusus zaman yang dialami tokoh, dari segi ekonomi politik budaya dan intelektual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum tentang Soeharto

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian "Analisis Wacana : Makna Pembangunan dalam Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971". Penelitian yang telah dilakukan terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto pada tahun 1968-1971 akan dibahas secara rinci dalam bab ini. Penguraian Pembahasan di bab ini menggunakan analisis wacana kritis dan juga studi tokoh. Sesuai dengan analisis wacana, studi tokoh dan juga penelitian kualitatif maka analisis penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis wacana dari segi teks pidato, dan analisis wacana dari segi keadaan pembangunan di negara.

Penelitian yang dilakukan berbasis pada data yang didapatkan dari pidato, karya tulis, dan juga pendapat tentang tokoh yang diteliti. Soeharto sebagai presiden Indonesia ke-2 memiliki masa yang lama waktunya menjabat, prestasi yang Indonesia capai, hingga pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pada masanya.

Segala data yang didapat didalam pidato di peroleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang sejumlah 4 buah pidato pada tahun 1968-1971. Pidato tersebut diucapkan langsung oleh Presiden Soeharto setiap tanggal 16 Agustus didepan anggota DPR-GR.

Dari kumpulan Pidato Kenegaraan tersebutlah segala tujuan dan juga maksud dari presiden dan juga perencanaan besar mulai diusung. Segala kata dalam pidatonya tidak hanya sekedar ucapan penyemangat saja, melainkan sebuah ajakan, sebuah rencana, sebuah tujuan agar Indonesia berkembang pada masa selanjutnya, seluruh pengucapan yang disampaikan memiliki banyak makna terkandung didalamnya. Sehingga didalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan memiliki sebuah nilai tersendiri untuk pembangunan Indonesia setahun ke depan.

Selain pidato, pengumpulan data yang akan dilakukan ialah dengan menggunakan buku biografi tokoh yang memiliki data lengkap mengenai tokoh yang disampaikan langsung kepada penulis. Sebagai acuan pendukung buku biografi dimaksudkan agar lebih memahami tokoh yang akan diteliti, agar lebih mengerti lebih dalam maksud dalam dirinya yang tersurat dalam ucapan perkataannya. Buku biografi inilah yang sebagai landasan dasar untuk bisa lebih tajam mengulas dan memahami inti dari maksud setiap perkataan yang diucapkannya.

Berdasarkan penilitan dan juga data yang didapatkan dari setiap sumber bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan juga kebenarannya karena dari Pemerintah dan juga Penerbit resmi yang memiliki afiliasi dengan negara.

Soeharto dikenal sebagai satu – satunya Presiden di Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama yaitu sekitar 32 Tahun. Dikenal dengan sebutan "Bapak Pembangunan". Soeharto merupakan Presiden Kedua

Indonesia setelah Soekarno, Soeharto di bawah pemerintahannya sukses mengantarkan Indonesia menjadi negara Swasembada dimana sektor dibidang pertanian amat berkembang dengan pesatnya melalui Program Rapelitanya.

Mantan Presiden Kedua Indonesia serta bapak pembangunan ini dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Ibunya bernama Sukirah dan ayah Soeharto yang merupakan seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah dan juga sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro. Ketika berumur delapan tahun Soeharto mulai bersekolah tetapi Soeharto sering berpindah – pindahan sekolah. Awalnya Soeharto sekolah di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean kemudian Soeharto pindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke Kemusuk, Kidul. Setelah itu kemudian ayahnya Kertosudiro memindahkan Soeharto ke Wuryantoro.

Beliau kemudian dititipkan dan tinggal bersama Prawirohardjo seorang mantri Tani yang menikah dengan adik perempuan Soeharto. Ditahun 1941 tepatnya di Sekolah Bintara, Gombong di Jawa Tengah, Soeharto terpilih sebagai Prajurit Telatan, sejak kecil Soeharto memang bercita – cita menjadi seorang tentara atau militer. kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 setelah Indonesia merdeka, Soeharto kemudian resmi menjadi anggota TKR.

Dalam bidang militer Soeharto memulainya dengan pangkat sersan tentara KNIL, dari situ Soeharto kemudian menjadi Komandan PETA

pada zaman penjajahan Jepang, setelah itu Soeharto menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor kemudian menjabat komandan batalyon dengan pangkat Letnan Kolonel. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949, itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan bangsa Belanda selama tiga setengah abad. Banyak versi mengatakan bahwa Peranan Soeharto ketika merebut Yogyakarta yang waktu itu sebagai Ibukota Republik Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret tidak bisa dipisahkan.

Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) ketika itu dalam membela Bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Soeharto berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkraman penjajah Belanda pada waktu itu. Pada waktu itu Soeharto juga menjadi pengawal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda ketika itu Soeharto yang menjadi panglima Mandala yang dipusatkan di Makassar.

Ketika peristiwa G-30-S/PKI meletus pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat ketika itu. Kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta oleh PKI. Setelah peristiwa G-30-S/PKI, Soeharto kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Jendral Ahmad

Yani yang gugur di tangan PKI. Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, Soeharto juga menjabat sebagai Pangkopkamtib yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu.

Puncak karier Soeharto ketika Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal sebagai "Supersemar" oleh Presiden Soekarno pada bulan Maret 1966 dimana tugasnya adalah mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran Besar Revolusi Bung Karno. Setelah peristiwa G-30-S/PKI keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk, kemudian pada bulan maret 1967 dalam sidang istimewa MPRS yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soekarno, dimana pengukuhan dilakukan pada Maret 1968. Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru dimana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden Soeharto. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB.

2. Pemikiran Soeharto tentang Pembangunan bagi Bangsa Indonesia

Pada masa kepemimpinan Soeharto langkah awal yang di lakukannya ialah melaksanakan pembangunan segala bidang demi menaikkan taraf hidup rakyat Indonesia. Pembangunan pada era awal kepemimpinan

Soeharto bertujuan untuk meningkatkan Ekonomi dalam jangka pendek yaitu lima tahun, untuk pertengahan kepemimpinan mulai melaksanakan pembangunan jangka panjang diantara 25-30 tahun.

Pembangunan tidak hanya difokuskan dalam bidang ekonomi saja melainkan mencangkup bidang - bidang lainnya seperti Politik dan Masyarakat. Pembangunan dalam bidang politik dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar mempermudah pelayanan birokrasi dalam tatanan pemerintahan. Selain itu pembangunan masyarakat yang dimaksudkan ialah mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih maju dan memahami kemampuan dan juga kapabilitas untuk bisa berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju.

Pidato Soeharto selama kurun waktu 1968 – 1971 memiliki beberapa fokus masing – masing untuk mendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional. Dalam tahun – tahun tertentu penyampaian informasi mengenai sikap yang harus dilakukan selanjutnya terus diperbaharui sesuai dengan hasil pembangunan di setiap tahunnya.

a. Pemikiran Soeharto dalam Pidato Kenegaraan Tahun 1968

Tahun 1968 adalah cikal bakal pembangunan nasional, karena pada tahun ini Soeharto mulai memaparkan perihal mengenai Pembangunan Nasional. Rencana pembangunan disampaikan berungkali sebagai penekanan bahwa Indonesia sudah saatnya melaksanakan pembangunan berskala nasional sebagai cara mewujudkan cita – cita negara. Soeharto menyampaikan bahwa

sikap – sikap yang diambil negara juga harus berbeda dengan masa Orde Lama yang menjadikan Politik sebagai panglima perang, Soeharto meyakinkan bahwa pembangunan juga sebagai salah satu cara untuk berjuang seperti yang tertera pada pidato nya berikut :

“Thema terpenting perdjongan kita pada taraf sekarang ini adalah perdjongan pembebasan Rakjat dari kemelaratan! Perdjongan itu adalah bekerdja-keras buat pem-bangunan; oleh karena kesedjahteraan Rakjat hanja dapat di-tjapai melalui pembangunan besar-besaran.” Pidato Kenegaraan (1968-7)

Pada tahun 1968 Soeharto juga menyampaikan dalam pidato kenegaraan nya mengenai tindakan – tindakan yang harus segera dilaksanakan negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan dalam negeri. Pembangunan Nasional mulai disampaikan kepada DPR-GR dalam Pidato Kenegaraan. Pada tahun ini dalam pidato nya Soeharto beberapa kali menyampaikan kesiapan masyarakat dan juga seluruh golongan untuk mempersiapkan pembangunan. Rencana pembangunan sudah matang dan juga bisa segera dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

Pembangunan Ekonomi yang dilakukan pada masa awal - awal kepemimpinan Soeharto ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memahami perjuangan seutuhnya seperti yang telah Soeharto ucapkan pada Pidato Kenegaraan 1968 :

“Thema terpenting perdjongan kita pada taraf sekarang ini adalah perdjongan pembebasan Rakjat dari kemelaratan! Perdjongan itu adalah bekerdjakeras buat pem-bangunan; oleh karena kesedjahteraan Rakjat hanja dapat ditjapai melalui pembangunan besar-besaran”. Pidato Kenegaraan Tahun (1968:7)

Berdasarkan ucapan Soeharto tersebut bisa dikatakan bahwa pembangunan ialah sebuah perjuangan bagi bangsa Indonesia agar bisa mencapai sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan yang dari masa kepemimpinan sebelumnya sangat sulit untuk didapatkan dikarenakan lebih aktifnya Indonesia sibuk pada bidang politik hingga melupakan bidang ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat Indonesia diabaikan. Dengan demikian Soeharto ingin meyakinkan kepada khalayak bahwa dengan melakukan pembangunan, Indonesia bisa mencapai kemerdekaan yang seutuhnya, mengingat bagaimana kepemimpinan Presiden Soekarno pembangunan terbengkalai seperti salah satu kutipan dalam pidatonya, :

"Mengenai masalah pembangunan ekonomi, kita memang harus berani mengakui bahwa hampir selama kemerdekaan ini hal tersebut terbengkalai. Kondisi sosial-ekonomi pada tahun-tahun pertama setelah pengakuan kemerdekaan kita jang relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun belakangan ini, tidak sempat kita djadikan landasan jang kuat bagi pertumbuhan ekonomi selandjutnja jang kuat dan madju. Bahkan „modal” jang kita miliki waktu itu selama belasan tahun telah mendjadi terbengkalai pengurusannja, sehingga lebih melemahkan potensi pembangunan kita". Pidato Kenegaraan (1968: 12)

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru diharapkan kesejahteraan masyarakat jadi meningkat. Pemerintah yang menitik beratkan perhatian ke Pembangunan juga memiliki target – target utama yang diantaranya adalah untuk menciptakan negara swasembada pangan, yang dimana Soeharto ingin menyiapkan pertanian dengan sebaik mungkin agar bisa

mendukung proyek besar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa melakukan import dari luar negeri, dalam hal ini padi diutamakan.

Untuk memenuhi target swasembada pangan pemerintah mulai membangun sektor pertanian yang dimulai dengan desa – desa melakukan penanaman padi secara serentak, selain itu pemerintah melakukan pembukaan ladang untuk penanaman padi. Sehingga peningkatan swasembada pangan bisa capai dengan baik. Untuk bisa memudahkan swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah adalah ekonomi desa, masyarakat desa.

Pembangunan Nasional oleh pemerintah dilakukan dengan basis desa. Yang dimaksudkan dengan basis desa ialah Pembangunan Nasional memiliki target pembangunan yang besar di sektor desa. Pembangunan yang diutamakan pada desa akan menjadikan pelaksanaan pembangunan lebih mudah karena target pembangunan ialah menjadikan Indonesia swasembada pangan yang dimana pertanian adalah sektor utama dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Basis desa yang diterapkan pemerintah akan mengembangkan sektor desa di Indonesia untuk meningkatkan hasil panen dan juga perkembangan Pembangunan infrastruktur agar desa bisa menjadi tempat yang lebih layak lagi. Pembangunan yang berbasis desa juga meningkatkan segi teknologi masyarakat

dengan meningkatkan infrastruktur desa sehingga bisa menyokong hasil dari Pembangunan Nasional.

Pembangunan berbasis desa dianggap lebih baik oleh pemerintah dan dijadikan basis utama Pembangunan Nasional mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dengan kata lain negara agraris oleh karena itu pembangunan dengan basis desa dengan meningkatkan hasil pangan dan panen petani adalah target utama agar pembangunan di Indonesia bisa berjalan dengan baik

Dalam pelaksanaan pembangunan yang paling berperan penting ialah masyarakat desa karena dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi basis adalah desa. Karena pembangunan yang dilakukan adalah berbasis desa maka peran masyarakat desa adalah hal yang sangat penting terlebih lagi pemerintah memiliki cara sendiri untuk mengembangkan masyarakat desa dengan menjadikan masyarakat untuk memiliki sikap mental. Seperti yang telah diucapkan oleh Soeharto pada Pidato Kenegaraannya tahun 1968 yang berbunyi :

"Satu hal yang perlu sangat diperhatikan adalah, bahwa di samping pembersihan kedalam, kita juga harus dapat merubah sikap mental kita sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Nasional yang bulat, berdasarkan konsensus Nasional yang telah kita tujai bersama.". Pidato Kenegaraan (1968:84)

Berdasarkan kalimat pidato diatas bisa menggambarkan sedikit keinginan Soeharto dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat mampu untuk merubah sikap mental agar bisa menjadikan masyarakat Indonesia lebih baik dan lebih siap dalam

menjalani Pembangunan Nasional. Soeharto juga menjelaskan kurang lebih dari sikap mental seperti pidato berikut ini :

"Kita dahulu berfikir setjara abstrak, sekarang kita berani melihat semua masalah setjara riil. Kita dahulu sangat emosional, sekarang kita telah lebih rasionil. Kita dahulu ditekan dari atas setjara otokratis, sekarang kebebasan tumbuh dari bawah setjara demokratis. Dahulu segala-galanya ditentukan dari atau oleh Pemerintah, sekarang kita merasakan kebebasan dan memberikan kesempatan pada inisiatif masyarakat. Dahulu kita mendewakan politik, sekarang kita mentjurahkan perhatian kepada perbaikan ekonomi". Pidato Kenegaraan (1968: 18)

Berdasarkan pidatonya ini sikap mental bisa berarti inisiatif masyarakat untuk berjuang dan juga agar bisa membantu untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Sikap mental diperlukan oleh pemerintah pada kala itu agar masyarakat bisa lebih inisiatif dalam berkehidupan dan mampu menyokong pelaksanaan Pembangunan Nasional yang direncanakan oleh pemerintah.

Perkembangan pembangunan juga diiringi perkembangan sikap mental masyarakat akan menjadikan pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik. Dengan sikap mental yang selalu diutarakan oleh pemerintah disetiap Pidato Kenegaraan maka pemerintah menargetkan adanya kemajuan pada tahap Pembangunan Nasional ini seperti pidatonya berikut ini :

"Pembangunan memerlukan tehnologi, pembangunan memerlukan sikap mental jang lebih terbuka. Perombakan ini tidak dapat sekaligus, melainkan harus bertahap; dan petani-petani kita harus yakin akan hasil-hasil pembaharuan ini. Pembaharuan harus bangkit didesa-desa, karena didesa-desa inilah terletak kekuatan Pembangunan kita". Pidato Kenegaraan (1968: 27)

Pidato pendukung yang menjelaskan pembangunan berbasis desa juga diucapkan sebagai berikut :

"Perombakan ini tidak dapat sekaligus, melainkan harus bertahap; dan petani-petani kita harus yakin akan hasil-hasil pembaharuan ini. Pembaharuan harus bangkit didesa-desa, karena didesa-desa inilah terletak kekuatan Pembangunan kita". Pidato Kenegaraan (1968: 27)

Dengan kata lain desa adalah kekuatan pembangunan pemerintah Indonesia pada kala itu. Dengan meningkatnya pembangunan di sektor desa juga pertanian yang di targetkan akan menjadikan Indonesia swasembada pangan maka sudah bisa dipastikan bahwa target utama pembangunan dari sektor pertanian telah terpenuhi.

Berdasarkan itu sikap mental sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai pendukung Pembangunan Nasional yang berbasis desa tetap berjalan dengan baik juga bisa mengembangkan kapabilitas masyarakat Indonesia agar lebih inisiatif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Pemikiran Soeharto dalam Pidato Kenegaraan Tahun 1969

Pada tahun 1969 dalam Pidato Kenegaraan Soeharto memfokuskan pada persatuan. Di tahun 1969 Soeharto menyampaikan di depan DPR-GR bahwa langkah awal untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah persatuan. Soeharto tidak ingin jika golongan dan juga seluruh elemen hanya mengambil sikap demi mementingkan diri sendiri.

Dalam hal ini persatuan yang di titik beratkan oleh Soeharto ialah persatuan sikap dalam menghadapi Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh negara. Soeharto menghimbau agar segala golongan tidak mementingkan kehendak masing – masing, akan tetapi bersatu demi melancarkan pembangunan nasional.

Demi melancarkan target pemerintah menegaskan bahwa perlunya persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia demi membantu pelaksanaan pembangunan bagi bangsa. Karena bahwasanya pembangunan tidak hanya berporos pada ekonomi saja akan tetapi pembangunan politik dan juga pembangunan masyarakat, dalam segi ini pemerintah menginginkan pembangunan segi masyarakat dengan adanya persatuan yang diharapkan oleh Soeharto sebagai cara untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk membangun kemampuan diri sehingga bisa ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Soeharto menekankan berkali – kali dalam pidato – pidatonya bahwa pembangunan masyarakat itu adalah hal yang wajib jika ingin pembangunan di Indonesia sukses. Pembangunan memang tidak hanya bisa dilaksanakan jika berporos pada ekonomi saja oleh sebab itu pembangunan masyarakat diperlukan agar segala hal yang sudah direncanakan oleh pemerintah tidak sia – sia dikarenakan kurang kerjasama rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam salah satu pidato Soeharto pernah menekankan tentang persatuan sebagai salah satu bentuk pembangunan masyarakat secara tidak langsung untuk memudahkan rencana pembangunan pemerintah. Dalam pidato tersebut soeharto berkata :

"Agar setiap golongan dapat memberikan sumbangannya jang positif bagi persatuan dan pembangunan Bangsa kita, maka golongan-golongan itupun harus bersatu dan harus mempunjai program kerdja jang djelas dalam rangka program Nasional."
Pidato Kenegaraan (1969: 8)

Berdasarkan kutipan pidato tersebut sudah bisa kita pahami persatuan pun sudah masuk dalam mensukseskan program Nasional. Oleh karena itu dalam perkembangannya pembangunan di awal Rapelita persatuan sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pendukung dilaksanakannya program tersebut. Dalam keberlangsungan Rapelita bentuk persatuan seluruh elemen masyarakat adalah hal yang diperlukan agar kedepannya tidak lagi terulang kejadian yang dimana beberapa kelompok tidak mendukung hingga ingin mengukudeta pemerintahan yang berdiri.

Pentingnya persatuan tidak bisa dianggap remeh oleh Soeharto dikarenakan mengingat kejadian yang terjadi pada tahun 65-66 sudah sangat mengacaukan dan mengganggu berjalannya pemerintahan. Sehingga pada awal kepemimpinannya pun sudah mengatakan segala unsur masyarakat harus bisa bekerjasama sebagai salah satu cara untuk menjawab tuntutan masyarakat demi menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka persatuan yang di perintahkan oleh Soeharto ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai hal menarik dua diantaranya adalah Penyederhanaan Partai dan pembentukan Golongan Karya yang berbasis masyarakat. Dengan Penyederhanaan Partai sudah bisa kita pahami sendiri bahwa maksud utamanya ialah tidak terlalu banyak memecahkan kepentingan atau keperluan kelompok – kelompok yaitu dengan cara melakukan penggabungan idealisme sebuah pemikiran masyarakat kedalam partai tertentu, seperti partai yang memiliki golongan partai berbasis agama akan dijadikan satu kedalam PPP, sehingga bisa kita pahami bersama bahwasanya terjadi sebuah persatuan elemen masyarakat dalam berpartai yaitu sudah digabungnya beberapa partai Islam menjadi satu partai saja.

PPP sudah bisa memenuhi lebih banyak aspirasi karena dengan menyatukan seluruh elemen Partai Islam dan kelompok – kelompok Islam. Dengan adanya PPP maka bisa menampung lebih banyak kuota keberagaman dalam perihal kepentingan, kebutuhan, dan juga tujuan untuk bisa dijadikan satu dalam sebuah partai yang baru saja disatukan. Walaupun untuk beberapa tahun ke depan ada beberapa anggota dari Partai Masyumi lama ingin mencoba untuk membuat Masyumi baru pada era Soeharto namun hal tersebut tidak bisa terealisasikan, karena seluruh partai yang berbasis Islam akan menjadi satu di dalam PPP.

Langkah untuk melakukan penggabungan ini adalah sebuah langkah emas dikarenakan sulitnya negara mengatur banyaknya aspirasi, kepentingan, dan juga kebutuhan yang berbeda dari banyak partai sekaligus sehingga setelah dibentuknya PPP sangat memudahkan persatuan karena dengan ini pemerintah mampu menerima aspirasi dari sekian banyak partai menjadi aspirasi dari PPP.

Langkah ini bisa di katakan sukses untuk mempersatukan elemen yang dahulunya terpisah dalam banyak partai menjadi satu partai. Selain suksesnya dalam Penyederhanaan Partai, pemerintah juga sukses dalam mendapat dukungan dari Golongan Karya yang notabennya bukan sebuah partai, Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964. Didirikannya Golkar memang sebelum berdirinya pemerintahan Orde Baru namun Golkar adalah hasil dari manifestasi keinginan masyarakat yang didukung oleh militer juga rakyat kecil. Oleh sebab itu Soeharto yang tidak lain dari bidang Militer pun mendapat dukungan besar dari Golkar, dengan dukungan yang besar itu pula pemerintahan Orde Baru bisa berjalan hingga 32 Tahun.

Dengan berbagai cara persatuan elemen masyarakat bisa dijadikan satu hingga bisa sedikit demi sedikit mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah. Mulai dari dukungan hingga

kerjasama dari seluruh elemen masyarakat bergotong – royong untuk mensukseskan pembangunan.

Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sudah pasti membutuhkan banyak dana, bahkan dana yang sangat besar untuk bisa menjalankan pembangunan besar – besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kebutuhan seperti itu maka pemerintah mengambil tindakan dengan cara merubah sikap politik negara Indonesia dengan menjadikan politik luar negeri berbasis politik bebas aktif. Politik Bebas aktif pada masa orde baru ditujukan untuk membantu pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

Politik Bebas aktif sebagai harapan besar bagi pemerintah Indonesia agar mampu membantu ketertiban dunia dan juga menjaga perdamaian. Oleh sebab itu Orde Baru mengambil sikap aktif dalam politik luar negeri sehingga nama Indonesia yang sebelumnya tertutup menjadi negara yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak pihak asing. Politik luar negeri membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang akan ikut serta menjalankan perdamaian dunia dimana searah dengan dasar falsafah negara.

Dengan Politik Bebas Aktif pula Indonesia memiliki jaringan kerjasama yang mulai membaik dengan negara – negara lain di dunia. Perlu dibanggakan langkah yang diambil oleh pemerintah

orde baru dengan masa pemerintahan yang di katakan baru akan tetapi langsung merubah tatanan politik luar negeri sehingga membuat Indonesia memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan negara lain. Dengan sikap seperti ini bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang besar pada pola perdagangan internasional demi mendukung Pembangunan Nasional.

Sikap pemerintah yang menjadikan politik luar negeri berbasis politik bebas aktif mendorong Indonesia memiliki nilai ekspor yang besar sehingga menghasilkan tingkat ekonomi yang lebih baik. Dalam bidang ekspor pemerintah juga menekankan searah dengan yang diungkapkan oleh Soeharto dalam Pidato Kenegaraannya pada tahun 1969 yang berbunyi :

"Ekspor tentu tidak akan dapat naik, apabila tidak ada rangkaian kegiatan, mulai dari produksi, pengumpulan, pengangkutan dan sebagainya. Demikian djuga, komposisi impor jang menundjukkan angka terbesar untuk bahan-bahan baku dan barang modal, berarti ada kegiatan-kegiatan jang mendorong produksi dan pembangunan didalam negeri." Pidato Kenegaraan (1969: 24)

Berdasarkan penggalan pidato tersebut bisa kita pahami bahwa pemerintah Orde Baru lewat tangan dingin seorang Soeharto mendukung tingkat Ekspor bangsa untuk bisa mendukung jalannya Pembangunan Nasional.

Demi peningkatan ekspor tersebut langkah Indonesia merubah sikap politik luar negeri adalah langkah yang tepat dimana dengan perubahan sikap tersebut Indonesia mampu menjalin hubungan

luar negeri yang jauh lebih baik dengan negara – negara lain di dunia. Kerjasama dan juga ikut sertanya Indonesia dalam hubungan luar negeri mampu mendukung tumbuhnya perkembangan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kesempatan ekspor barang Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Dengan meningkatnya ekspor Indonesia memiliki kesempatan yang lebih baik dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional dari hasil ekspor yang meningkat pasca diberlakukannya politik bebas aktif. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam pidato yang disampaikan oleh Soeharto pada tahun 1969. Dengan menjadikan Indonesia politik bebas aktif mampu membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ikut serta dalam perdamaian dunia.

c. Pemikiran Soeharto dalam Pidato Kenegaraan Tahun 1970

Pada Tahun ini Soeharto memfokuskan pembahasan pembangunan dalam hal Stabilitas Ekonomi dan Politik luar negeri. Stabilitas Ekonomi dan juga politik luar negeri adalah cara Soeharto demi melancarkan pembangunan. Dengan kembalinya Indonesia di kancah Internasional diharapkan bisa membantu untuk mewujudkan cita – cita menjaga ketertiban dunia, selain itu juga bisa membantu jalannya Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah.

Stabilitas Ekonomi menjadi perhatian dikarenakan demi melancarkan pembangunan. Stabilitas ekonomi dan hasil Ekspor sebagai hasil dari kebijakan Politik luar negeri Indonesia dinilai mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi modal dalam melaksanakan pembangunan nasional seperti yang dikatakan Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 1970 berikut :

“Dibidang luar negeri, perobahan dan kemadjuan sangat terasa. Hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara luar jang dilandaskan pada Ketetapan MPRS serta memegang teguh prinsip politik luar negeri jang babas dan aktif sungguh sangat dirasakan manfaatnja, baik dalam meningkat-kan posisi Indonesia dalam pertjaturan politik dunia umumnja maupun dalam mengerahkan dana-dana dari luar negeri guna kepentingan usaha-usaha pembangunan kita.” Pidato Kenegaraan (1970:25)

Stabilitas Ekonomi dan juga Ekspor yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Tahun 1971 ialah hasil dari perubahan sikap politik negara Indonesia di dalam negeri dan juga luar negeri. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti menjaga nilai tukar dan juga inflasi.

Untuk bisa melancarkan Pembangunan Nasional langkah ekonomi dalam negeri ialah melakukan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dilakukan pemerintah demi tetap membuat ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik. Mulai dari menjaga inflasi hingga nilai tukar rupiah adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dilakukan bertujuan agar Pembangunan Nasional tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan pemerintah.

Stabilitas ekonomi dilakukan pemerintah mulai dari tahun 1968 sebagai langkah terakhir untuk bisa melaksanakan pembangunan dengan baik hal tersebut telah diungkapkan oleh Soeharto pada Pidato Kenegaraannya pada tahun 1970 yang menyatakan :

"Diarahkan untuk membulatkan usaha reha-bilitasi dan stabilisasi ekonomi untuk meletakkan batu-batu terakhir dalam mempersiapkan landasan pembangunan. Dalam rangka ini, maka usaha pengendalian inflasi tetap merupakan, salah satu usaha utama, sehingga prinsip anggaran belandja yang seimbang tetap dipegang teguh." Pidato Kenegaraan (1970:59)

Berdasarkan penggalan pidato diatas bisa dilihat bahwa langkah Soeharto dalam Pembangunan Nasional sudah direncanakan dengan baik. Dengan persiapan dan juga langkah apa saja yang diambil pemerintah menjadikan pemerintah pada masa orba siap menghadapi Pembangunan Nasional. Langkah stabilitas ekonomi juga dilakukan agar masyarakat tidak terlalu mendapat dampak yang merugikan jika inflasi tidak dijaga oleh pemerintah pusat.

Bila Inflasi tidak dijaga oleh pemerintah maka bisa dipastikan yang merasakan dampak paling besar ialah rakyat Indonesia, rakyat akan mendapat kesulitan dalam perkembangan ekonomi hingga akan merasa sulit mendapatkan bahan pokok kebutuhan sehari – hari jika nilai inflasi tidak dijaga oleh pemerintah. Hal ini juga bisa berdampak pada berkurangnya kelancaran Pembangunan Nasional jika masyarakat terhambat dalam perkembangan ekonomi mandiri. Oleh sebab itu langkah pemerintah dalam stabilitas ekonomi

nasional dinilai langkah yang benar dalam persiapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan Stabilitas ekonomi yang terus dijaga oleh pemerintah maka perkembangan ekonomi setiap tahunnya sudah berada pada jalur yang pemerintah harapkan. Dengan dijaganya inflasi juga perkembangan ekonomi nasional mampu membuat pembangunan berjalan semakin baik setiap tahunnya. Dalam tahun – tahun pembangunan masa politik pun sudah didepan mata dengan adanya pemilu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

d. Pemikiran Soeharto dalam Pidato Kenegaraan Tahun 1971

Pada tahun ini Soeharto menyiapkan hal – hal lain untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tahun 1971 Soeharto masih memfokuskan pada stabilitas politik karena pasca Pemilu, namun juga memberikan perhatian lebih pada pembangunan.

Sebagai bentuk dari demokrasi sudah semestinya pemilu juga diadakan di Indonesia, pada masa Orde Baru pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1971. Pada tahun yang sama pemerintah Orde Baru memberikan sebuah pernyataan kepada seluruh pelaku politik Indonesia yang dimana pernyataan tersebut berbunyi "Politik tidak boleh mengganggu Pembangunan Nasional".

Ungkapan tersebut diucapkan oleh Soeharto pada tahun 1971 dikarenakan banyak yang menganggap bahwa pembangunan akan terganggu oleh pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada

tahun 1971. Lantas tindak lanjut seorang Soeharto dengan mengatakan hal tersebut pada Pidato Kenegaraan yang berbunyi

"Berulang kali saja telah mengadjak; agar dalam berusaha menjari pengaruh dan suara Rakjat, djanganlah sampai mengorbankan Rakjat itu sendiri karena menjeret saling beradunja kekuatan-kekuatan Rakjat itu, djanganlah sampai mengorbankan kepentingan Rakjat dan djangan pula menghambat pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup Rakjat. Pemilihan Umum itu pendapat Rakjatlah jang ingin dikemukakan, keinginan Rakjatlah jang ingin disuarakan melalui Partai-partai Politik dan Golkar." Pidato Kenegaraan (1971: 11)

Berdasarkan ucapan tersebut bisa disimpulkan bahwa target pemerintah tidak ingin terganggu dengan adanya pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 1971 tanggal 5 Mei dan juga diikuti oleh 10 Partai. Dari pemilu yang telah dilakukan oleh pemerintah banyak yang menganggap bahwa Politik kala itu mengganggu perkembangan Pembangunan Nasional Indonesia yang sudah dilakukan semenjak tahun 1969.

Lantas ungkapan tersebut dilakukan sebagai bentuk peduli pemerintah kepada Pembangunan Nasional ditujukan kepada seluruh pelaku politik bahwa dengan pesta politik yang telah dilakukan tidak boleh mengganggu jalannya pembangunan yang telah lama direncanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan pembangunan yang sudah dilaksanakan semenjak tahun 1969 sudah berjalan 3 tahun lalu diadakannya pemilu tahun 1971. Pemerintah tidak begitu saja meletakkan tugas untuk melaksanakan pembangunan, pembangunan tetap menjadi prioritas

utama oleh pemerintahan orde baru. Karena perjuangan yang telah dilakukan bersama demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia tidak begitu saja tergantikan oleh Pemilu yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan perintah tersebut pemerintah berharap bahwa hirup pikuk pemilu serta terpilihnya pemimpin dan juga wakil rakyat tidak mengesampingkan kewajiban utama yaitu pada pembangunan. Karena pembangunan yang sudah direncanakan dengan baik dengan persiapan juga langkah – langkah yang matang tidak bisa diabaikan hanya dengan diadakannya pemilu oleh pemerintah, Soeharto pada tahun juga ini menyampaikan pentingnya setiap golongan menjaga stabilitas politik agar tidak mengganggu Pembangunan Nasional. Pada tahun ini Soeharto menyampaikan mengenai ABRI yang akan diperbantukan demi menjaga stabilitas Politik dalam sistem Dwifungsi ABRI.

Sudah sewajarnya hal tersebut dilakukan karena mengingat PELITA adalah target utama yang ditargetkan pemerintah demi meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia dalam hal tersebut politik tidak boleh mengganggu kehidupan berlangsungnya Pembangunan Nasional karena dianggap melenceng dari target utama yaitu meningkatkan ekonomi bangsa.

Soeharto juga mengatakan bahwa Politik tidak mengganggu pembangunan dengan kalimat yang Soeharto utarakan pada Pidato Kenegaraan pada tahun 1971 yang berbunyi :

"Pemilihan Umum ternjata tidak mengganggu kestabilan ekonomi dan pembangunan; malahan keadaan ekonomi makin stabil dan mantap serta pelaksanaan pembangunan berdjalan menurut rentjana dan menaikkan tingkat produksi." Pidato Kenegaraan (1971:15)

Kalimat yang diutarakan oleh Soeharto tersebut memberikan sebuah angin segar kepada masyarakat yang menilai bahwa pemilu dan juga ramainya politik nasional yang dianggap mengganggu Pembangunan Nasional adalah salah. Pidato Soeharto tersebut meyakinkan bahwa Politik tidak mengganggu berjalannya Pembangunan Nasional bahkan politik mampu menstabilkan ekonomi sehingga pembangunan bisa berjalan dengan jauh lebih baik.

Berdasarkan pembangunan yang tetap berjalan lancar sikap pemikiran Soeharto dalam Pembangunan Nasional mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang sebelumnya pada masa kepemimpinan Soekarno lebih mementingkan politik. Dengan sikap politik yang tidak mengganggu jalannya Pembangunan Nasional, Soeharto dengan pemerintah Orde Baru – nya mampu meningkatkan pembangunan Indonesia.

Demi tetap berlangsungnya pembangunan juga politik yang baik maka persatuan juga stabilitas politik tetap menjadikan

perhatian pemerintah, dengan masa pembangunan yang masih berjalan juga hasil dari pemilu yang telah diketahui maka pemerintah memiliki sikap untuk bisa menyelaraskan keduanya dengan persatuan juga stabilitas politik demi berjalannya pemerintahan yang lebih baik. Sesuai dengan ucapan Soeharto pada tahun 1971 :

"Kepada seluruh Rakyat saja serukan terus bersatu padu. Djangan lagi dilsoalkan apakah tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, bawahan kita atau atasan kita, memilih „tanda gambar” jang berbeda-beda. Memilih dalam Pemilihan Umum adalah kesadaran dan hak demokrasi. Bersatu padu adalah kesadaran kita sebagai Bangsa jang ingin madju bersama-sama, bekerdja dalam pembangunan adalah kewadjiban kita dan menikmati hasil pembangunan adalah hak kita semuanya.". Pidato Kenegaraan (1971:14)

Persatuan ialah hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia demi tetap melanjutkan Pembangunan Nasional, tidak memperdulikan banyaknya isu – isu negatif yang telah diucapkan oleh banyak oposisi yang menganggap pemerintah Orde Baru tidak menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka persatuan adalah jawaban yang tepat demi menjalankan politik nasional.

Pemikiran pembangunan Soeharto tercurah dalam pidato – pidatonya yang diucapkannya pada Pidato Kenegaraan dari tahun 1968-1971 hari penjelasan yang telah diberikan bisa dimengerti bahwa bagaimana pola pikir pembangunan Indoensia menurut Soeharto.

B. Pembahasan

Soeharto yang memiliki rekam jejak cukup sulit pada masa kecilnya, dimana Soeharto harus berpindah – pindah sekolah demi bisa mengais ilmu untuk kedepannya, selain itu kondisi keluarga yang cukup rumit mengharuskan Soeharto untuk tinggal bersama dengan pamannya. Hal – hal yang menyulitkannya pada masa kecilnya membantu Soeharto untuk terus berkembang dan melakukan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara, terbukti dengan dirinya yang menjadi lulusan terbaik di KNIL kala itu, Soeharto menjadi Jendral yang diperhitungkan keberadaanya di negara ini.

Kesulitan ekonomi yang dirasanya cukup lama memberikan pemikiran saat Soeharto menjabat lebih mengutamakan pembangunan ekonomi sebagai landasan besar bagi titik kemajuan bangsa Indonesia. Pembahasan akan dilakukan lebih lanjut dalam bentuk point – point.

1. Latar Belakang Pemikiran Soeharto

Soeharto menjadi presiden setelah menerima Super Semar oleh Soekarno pada tahun 1966, dalam masa sebelum Soeharto menjabat sebagai seorang presiden banyak liku kehidupan dialami oleh Soeharto sehingga menjadikan Soeharto sosok yang ingin melakukan perubahan pada negara dengan memajukan pembangunan.

Harahap (2014), menjelaskan dalam analisis Studi Tokoh dua hal yang patut di garis bawahi ialah interpretasi pemahaman tentang "emik" dan "etik" dan juga pemahaman kesinambungan historis dari suatu tokoh yang diteliti. Maka dalam pembahasan di sub bab ini point – point yang

kabur penjelasannya akan dijelaskan dengan rinci sesuai dengan keilmuan dari bentuk analisis ini, dimana penggunaan diksi yang dilakukan Soeharto dalam pidato – pidatonya akan diteliti sehingga memberikan keterangan yang jelas agar bisa dipahami dengan lebih baik maksud dari ucapannya.

Masa kecilnya diliputi oleh banyak peristiwa yang mempengaruhi kehidupannya selanjutnya, saat masa kecilnya kurang beruntung sehingga harus sering berpindah sekolah untuk bisa mengenyam pendidikan yang baik, mulai dengan membantu pamannya, kerabat ayahnya hingga rekan dari orang tuanya yang mampu memberikan Soeharto gembengan dalam menjalani kehidupan yang keras.

Lika likunya saat masih berusia anak – anak membuat mentalnya terbentuk hingga bisa menjadi sosok presiden yang tangguh demi meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi, derita yang dialami ketika masih anak – anak menjadi tolak ukurnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya kenangan sulit Soeharto saat masih kecil membuatnya semakin kuat dalam menjalani kehidupan, ketika saat Soeharto masuk dalam KNIL Soeharto dinobatkan sebagai lulusan terbaik, dan pada masa di PETA Soeharto juga dengan mudah masuk menjadi keanggotaannya.

Masa pendidikannya di KNIL dimulai saat Soeharto memustuskan keluar dari pekerjaannya sebagai pengikut Klerek Bank Desa kala itu, Soeharto melangkahkan diri untuk mendaftar dalam KNIL dan dalam awal karirnya sudah memiliki kemampuan yang di katakan melebihi dari

Anggota lainnya, sehingga Soeharto mendapat pelatihan khusus untuk mendapatkan posisi Kopral dan setelah beberapa waktu menjadi Sersan, dalam pelatihan Kadet Soeharto membuktikan diri menjadi lulusan terbaik.

Pasca pendudukan Jepang di Indonesia seluruh tentara yang terbukti memiliki afiliasi dengan KNIL mendapatkan hukuman, mulai dari penculikan, kurungan, hingga hukuman mati. Oleh sebab itu Soeharto cekatan untuk melucuti semua hal yang berbau KNIL pada dirinya, dan mendaftar dalam PETA sebagai juru masak, Soeharto memasuki PETA tanpa diketahui oleh pihak Jepang dan dengan mudah mampu masuk ke PETA karena dahulunya sudah pernah berada dalam militer.

Pada masa setelah kemerdekaan Soeharto menjadi Jendral dan memimpin berbagai pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia demi memelihara kemerdekaan bangsa dan negara seperti yang diucapkannya dalam buku OTOBIOGRAFI yang dituliskan oleh G.Dwipayana, kalimat tersebut ialah “bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing – masing untuk kepentingan bersama, ialah menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa (Soeharto, dalam Dwipayana 1989)

Pasca masa emasnya dalam militer Soeharto mendapatkan mandat tertulis dari Presiden Soekarno untuk menggantikannya sebagai Presiden Indonesia. Dalam menerima mandat Soeharto melakukannya dengan sungguh – sungguh demi memajukan Indonesia ke tempat yang lebih baik.

Dengan munculnya pemberontakan juga ekonomi yang berada pada titik nadir kemampuan masyarakat untuk menghidupi keluarga, Soeharto dengan cekatan untuk menjadikan PKI sebagai partai yang terlarang, begitu juga pemahannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKI diluluhlantahkan sehingga paham yang bisa menghancurkan bangsa mulai bisa teratasi.

Berdasarkan riwayat masa kecilnya hingga masa sebelum Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2, masa kepemimpinannya pun tidak jauh dari hasil jatidiri yang telah Soeharto dapatkan. Soeharto tidak dengan mudah meninggalkan politik, namun bukan hal itu yang menjadikannya sebagai tolak ukur, melainkan Ekonomilah yang dijadikan senjata utama Soeharto untuk menjadikan Indonesia negara Swasembada dan mengutamakan Pembangunan demi keberlangsungan masa depan yang jauh lebih baik. Seluruh rencana pembangunan Soeharto disampaikannya melalui Pidato Kenegaraan setiap tahunnya, dan rencana awal pembangunan Soeharto sudah mulai dijelaskan pada Pidato Kenegaraan Tahun 1968. Pada tahun ini awal rencana pembangunan sudah mulai digunakan kepada seluruh wakil rakyat di DPR dan MPR, sehingga Soeharto sudah dengan mutlak siap melaksanakan Pembangunan di tahun selanjutnya.

Dalam pidato yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1968, memiliki tema umum besar yaitu pembangunan Indonesia mulai dalam perencanaan dan juga sudah mulai masuk babak baru agar

bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca keterpurukannya Indonesia dalam bidang ekonomi di masa Orde Lama. Politik yang digembor – gembor kan pada masa orde lama ternyata menjadi sebuah bumerang bagi negara karena, fokus pemerintah hanya dalam bidang politik saja atau lebih sering dikenal dengan politik senjata utama ternyata malah menelantarkan masyarakat Indonesia didalam keterpurukan di berbagai bidang. Oleh sebab itu Soeharto muncul sebagai sosok presiden pengganti setelah turunnya Soekarno memberikan sebuah angin segar bagi masyarakat kala itu dimana pembangunan di semua sektor mulai untuk dikerjakan.

Pembangunan dalam masa kepemimpinannya menjadi sebuah senjata utama untuk memakmurkan Indonesia, caranya yang mendongkrak segi ekonomi berbeda dengan cara orde lama yang fokus dalam bidang politik. Mungkin karena hal inilah Orde Baru bisa di katakan sukses besar dalam memajukan ekonomi dan juga pembangunan di Indonesia pada masanya. Pembangunan dalam setiap pengucapannya memiliki makna berbeda dalam penyampaiannya di sebuah Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto oleh karena itu sesuai dengan data di atas yang telah didapat maka pembahasan mengenai makna pembanguan akan di bahas satu – persatu agar bisa menjelaskan makna pembangunan dalamPidato Kenegaraan Presiden Soeharto.

Adrian Leftwich (2000:17) menyatakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan

pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis (development as historical progress), pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam (development as the exploitation of natural resources), pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, dan (kadang kala) sosial, dan politik yang direncanakan (development as the promotion of planned economic, and (sometimes) social and political advancement); pembangunan sebagai suatu kondisi (development as a condition); pembangunan sebagai suatu proses (development as a process); pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (development as economic growth); pembangunan sebagai perubahan struktural (development as structural change); pembangunan sebagai modernisasi (development as modernization); dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi (development as an increase in the forces of production).

Dengan pembangunan yang di usung oleh Soeharto mulai dari tahun 1968 memberikan dampak positif bagi negara dengan mulai berkembangnya sistem pertanian dan juga pembangunan di berbagai bidang, tak lepas pembangunan yang diusung oleh Soeharto ialah sebuah proses menuju perkembangan Indonesia dalam waktu yang panjang sehingga pembangunan pada masa Orde Baru relevan dengan Teori yang menunjukkan kesamaan realita dengan harapan yang berada pada pundak Soeharto sebagai Pemimpin Negara.

Pemahaman lain diuraikan dalam pemikiran Soeharto yang berbentuk Program Kerja di analisis dalam bentuk tabel menurut Hadi (2008: 92) juga menyebutkan bahwa inti dari Hermeneutik Dilthey mencangkup konsep segitiga yaitu, Erlebnis

(pengalaman yang hidup), Ausdruck (ungkapan), dan Verstehen (pemahaman).

Konsep pertama pada teori Dilthey adalah Erlebnis yang berarti “mengalami”

Palmer (2005:107) sebagai berikut;

No.	Ausdruck	Verstehen	Erlebnis
1	RAPELITA/PELITA	Usaha itu, telah kita susun setjara djelas dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun, jang apabila sasa-ran-sasaran jang ditentukan dalam berbagai sektor dapat kita tjapai, kita perkirakan dapat mentjapai tingkat pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% setahun.	Dalam pelaksanaannya PELITA dilaksanakan dalam Pembangunan PELITA itu sendiri.
2	Penyederhanaan Partai	Agar setiap golongan dapat memberikan sumbang-annja jang positif bagi persatuan dan pembangunan Bangsa kita, maka golongan-golongan itupun harus bersatu dan harus mempunjai program kerdja jang djelas dalam rangka program Nasional	Tujuan Penyederhanaan Partai ialah untuk melaksanakan persatuan.
3.	GBHN	GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita).	GBHN disesuaikan setiap Lima Tahun sesuai dengan prospek kerja RAPELITA.

4.	P4	P4 guna memperlancar pelaksanaan pembangunan yang terus berlanjut dan berbeda setiap lima tahunnya	P4 dilaksanakan untuk membuat masyarakat mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.
----	----	--	---

Tabel 4.1 Sumber dari pidato – pidato Kenegaraan Soeharto

2. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah suatu kondisi di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan tugas dan tanggungjawab ganda yang diembankan oleh Pemerintah kepada TNI, maka peran militer dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia pada masa Orde Baru semakin besar.

Dwifungsi ABRI berperan besar dalam berjalannya pemerintahan pada masa orde baru karena hampir dalam segala posisi penting di Negara Indonesia diisi oleh militer yang bertugas, selain menjalankan pemerintahan, ABRI profesional juga menjadi warga Negara yang membantu berjalannya kehidupan bermasyarakat yang baik di segala lini.

Dasar Hukum dari Dwifungsi ABRI pada masa orde baru yaitu dimulai dengan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 yang kemudian

disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, isinya: “Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatukan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila dan UUD 1945 yang kuat dan sentosa”. Kemudian Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengukuhkan Dwifungsi ABRI sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, yang isinya: “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat bersama rakyat menegakkan kemerdekaan bangsa dan negara” Tambunan (1995:120).

Sebagai lanjutan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 pada tanggal 19 September 1982 telah diundangkan Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Kemudian yang terakhir Undang-undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang ditegaskan dalam pasal 6, yaitu: “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik” Tambunan (1995:122).

Dwifungsi ABRI yang didasari dengan hukum yang terikat satu dengan lainnya memiliki kekuatan yang besar dalam tatanan hukum di Indonesia, karena hal tersebut Dwifungsi ABRI menjadi salah satu hal utama dalam berjalannya pemerintahan masa Orde Baru, dengan adanya

Dwifungsi ABRI tugas tidak hanya menjaga keamanan bernegara akan juga tetapi juga berpolitik, selain itu lini kerja dari ABRI semakin masuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalankan pembangunan nasional yang di jalankan oleh Pemerintah.

Pada hakekatnya dalam menjalankan tugas dan juga pemerintahan dasar Negara serta pemahaman Pancasila semakin dalam dikuasai oleh seluruh anggota yang bertugas, oleh sebab itu penyebarluasan mengenai P-4 dilakukan secara berkelanjutan demi membantu melaksanakan pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah.

Dwifungsi ABRI diberlakukan di masa orde baru adalah demi membantu pemerintahan agar berjalan lebih baik serta mempermudah hubungan pusat dan daerah serta mengatur dinamika perubahan yang berbeda – beda itu menuju keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Fungsi ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator dilakukan didasari oleh aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, keterkaitan segala hal kehidupan bermasyarakat dilakukan oleh ABRI sebagai kesetiaan pada militer dan non militer, peran berkaitan dengan kemanunggalan ABRI dengan masyarakat Dwifungsi hanya dapat dilaksanakan dengan sikap setia pada norma-norma yang terdapat dalam Sapta Marga.

Bentuk fisik sifat dinamisator ialah ABRI masuk desa yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu pembangunan fisik yang dijalankan oleh pemerintah, selain itu kemampuan ABRI berkomunikasi dengan rakyat, serta untuk merasakan aspirasi dan kebutuhan – kebutuhan langsung dari rakyat.

Sifat stabilisator ABRI ialah saat melaksanakan komunikasi dengan rakyat menjadi salah satu bentuk pengawasan sosial, selain itu kesadaran nasional yang tinggi dimiliki oleh prajurit ABRI dengan tidak terpengaruh efek negatif dari budaya – budaya asing yang masuk di Indonesia.

Dalam hal ini Dwifungsi ABRI yang dijalankan pada masa kepemimpinan Soeharto ialah tidak lain sebagai saran yang membantu pembangunan nasional sesuai dengan target pemerintah yang sudah memiliki dasar hukum yang kuat, Soeharto sebagai Jendral TNI memiliki pengaruh kuat kepada jajaran militer yang menjabat demi melaksanakan tugas kenegaraan agar lebih baik, lebih mudah dalam penyelarasan informasi juga komando kepada pemimpin daerah yang ditugaskan.

3. Agenda Pembangunan

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut perlu dipikirkan langkah-langkah yang harus diambil di masa depan, atau dengan kata lain diperlukan suatu agenda pembangunan. Tantangan globalisasi adalah

tantangan utama dalam Repelita VII. Untuk itu dalam bidang ekonomi perlu terus diupayakan penyerasian strategi ekonomi Indonesia dengan keadaan yang sedang berkembang agar bangsa Indonesia diuntungkan. Kuncinya dari segi ekonomi tidak lain adalah membangun daya saing dan memeliharanya agar berkesinambungan.

Daya saing tidak dapat lagi semata – mata ditentukan oleh upah buruh yang rendah dan sumber daya alam yang berlebih akan tetapi lebih ditentukan oleh penguasaan informasi, teknologi, dan keahlian manajerial.

Ini berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diprioritaskan dan ini terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kesemuanya akan bermuara pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dunia usaha akan pertama kali bertarung di pasar bebas. Walaupun disadari bahwa struktur dunia usaha telah kelihatan semakin maju terutama pada usaha – usaha berskala besar, namun struktur lapisan usaha nasional masih belum mantap dan kukuh. Hal ini terutama berkaitan dengan lapisan ekonomi usaha skala kecil (ekonomi rakyat) yang jumlahnya banyak tetapi memiliki aset produktif yang sangat terbatas.

Selama ini saja, lapisan usaha skala kecil sudah jauh tertinggal. Apalagi harus dihadapkan pada persaingan dengan kekuatan – kekuatan ekonomi dari luar. Lapisan ekonomi menengah juga belum berkembang sebagaimana layaknya, yaitu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sehubungan itu, segenap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh

negara harus ditujukan ke arah membangun pertumbuhan yang serasi dengan pemerataan dan keadilan.

Kebijaksanaan – kebijaksanaan ekonomi baik makro, sektoral, maupun regional harus secara terpadu mengupayakan agar ekonomi usaha skala kecil dapat secepatnya bangkit dan menjadi kukuh dan mantap.

Berkaitan dengan pengembangan usaha skala kecil, di samping melalui upaya tersebut di atas, juga diperlukan upaya – upaya yang spesifik. Upaya tersebut harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat melalui upaya – upaya pemberdayaan.

Upaya khusus tersebut antara lain adalah: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan melindungi yang lemah sebagai akibat kurang keberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Peningkatan keuntungan bagi dunia usaha tidak saja melalui kemampuan produksi namun juga kemampuan pemasaran. Dari pengalaman negara – negara yang sudah maju dan yang baru masuk dalam tahapan industri dapat ditarik pelajaran bahwa kemampuan berproduksi harus merupakan gerakan terpadu dengan kemampuan menembus pasar.

Oleh sebab itu, sasaran pembangunan pada akhir PJP II tidak saja menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa industri yang kuat tapi juga menjadikan Indonesia menjadi bangsa niaga. Karena itu modernisasi mengandung kondisiberupa sistem sosial yang bisa secara terus – menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, struktur sosial yang

terdiferensiasi dan luwes, serta kerangka sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi kehidupan dalam dunia yang secara teknologi sudah maju, Ramlan Surbakti (1992).

Bangsa yang kuat harus dapat memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya, yaitu potensi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang merata, bukan hanya mutlak untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan berlandaskan kemandirian.

Kemajuan dan kemandirian yang menjadi sasaran pembangunan bangsa Indonesia selain merupakan ukuran kemampuan adalah juga sikap budaya. Globalisasi akan mempengaruhi sistim nilai yang membentuk budaya bangsa. Materi sebagai ukuran keberhasilan dan sikap individualisme yang hidup dikalangan masyarakat barat dapat pula merasuk pula ke dalam budaya kita. Demikian pula nilai – nilai moral yang berbeda dapat menimbulkan benturan – benturan budaya. Oleh karena itu memperkuat ketahanan budaya harus menjadi agenda pembangunan yang pokok pula.

Maka masalah budaya menduduki tempat yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan semua bidang lainnya dalam seluruh konsep pembangunan bangsa kita, bahkan adalah yang paling mendasar. Kalau kita berbicara mengenai budaya, Soeharto tidak hanya menyangkut aspek – aspek sosial, tetapi juga budaya ekonomi dan budaya politik. Apabila

berbagai langkah seperti diuraikan di atas berhasil kita laksanakan, maka Indonesia akan berjalan dengan mantap menuju cita – citanya yaitu bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

4. Demokrasi

Dalam masa kepemimpinannya masyarakat menjelaskan bahwa secara umum masa orde baru bukan lah masa yang demokrasi namun berlindung dibaliknya untuk menjaga kekuasaan dengan tangan besi. Hal tersebut tidak semuanya benar, jika melihat salah satu ucapan Soeharto pada Pidato Kenegaraan-nya ;

“Hal berarti, bahwa dalam melaksanakan pembangunan inipun kita sekaligus mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan mempertebal rasa tanggung jawab warga-negara. Sebab itu, seperti yang juga raja katakan setahun yang lalu, pembangunan dan demokrasi adalah satu nafas. Dengan selesainya Pemilihan Umum berarti kehidupan demokrasi kita makin berkembang; dan sekaligus kita usahakan agar stabilisasi politik lebih mantap.” Pidato Kenegaraan (1971:40)

Makna demokrasi yang dijelaskan oleh Soeharto ialah kebebasan masyarakat untuk bisa membantu pemerintah untuk menstabilkan politik sekaligus membantu agenda pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Demokrasi yang berarti luas juga bisa dimanfaatkan Soeharto untuk membebaskan masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dalam usahanya membangun Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang.

Demokrasi juga tak bisa terlepas dari pers, dimana pers sebagai tolak ukur sebuah negara membebaskan masyarakat untuk bersuara dan juga berpendapat. Hal inilah yang disoroti oleh masyarakat terkait

kepemimpinan orde baru yang dikenal tidak mengenal kata ampun terhadap pers juga tidak membebaskan pers sebagaimana negara demorkasi semestinya, namun dalam sebuah kesempatan Soeharto menyelipkan kalimat tentang Pers.

“Kebebasan pers yang sekarang telah dapat dinikmati, hendaknja benar-benar didjaga dan didjundjung tinggi oleh pers saridiri. Seperti halnja dengan kebebasan-kebebasan lainnja yang dimungkinkan dalam suasana Orde-Baru sekarang ini, kebebasan perspun mengenal batas-batas, sehingga benar-benar harus disertai dengan rasa tanggung djawab kepada Tuhan Jang Maha Esa, mendjundjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat dan mempertjepat pelaksanaan pembangunan.” Pidato Kenegaraan (1968: 32)

Sikap Soeharto yang dinilai keras oleh pers dinilai sebuah pelecehan terhadap nilai demokrasi, jauh lebih banyak masyarakat menilai tindakan pembredelan yang dilakukan oleh Soeharto ialah membungkam demokrasi. Akan tetapi hal penting lainnya dilupakan oleh masyarakat ialah mengenai tanggung jawab yang dipertanyakan oleh pemerintah. Tanggung jawab dari pendapat dan argumentasi yang dilontarkan pers harus diiringi tanggung jawab yang besar, karena hal itu berkaitan dengan kestabilan politik dalam negeri.

Hal yang dikhawatirkan oleh pemerintah ialah kestabilan politik yang tengah dibangun oleh pemerintah akan bisa hancur seiring maraknya terbitan yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu demi menjaga stabilitas politik dan juga demi terus melancarkan stabilitas ekonomi pemerintah memberikan batasan – batasan tertentu kepada pers agar tujuan negara demi memajukan kehidupan bangsa akan terus berlangsung.

Suroso (2002:21), menjelaskan Surat kabar selalu memiliki medan wacana berupa berita apa, pelibat wacana berupa hubungan penulis dengan pembacanya, dan sarana wacana berupa pemberitaan yang semua itu merupakan konteks situasi. Sementara itu, konsep visi dan misi dari pers sebagai pemegang kendali surat kabar, peran dan kedudukan pemerintah dalam pers, struktur peran jurnalistik, penerbit, pembaca, dan lain – lain merupakan faktor pembentuk konteks budaya dan bersama membentuk penafsiran teks dalam konteks situasinya.

Peran pers diperlukan untuk membantu pemerintah mendapatkan dukungan masyarakat demi melancarkan pembangunan yang diagendakan oleh pemerintah, oleh sebab itu batasan diberikan pemerintah kepada pers yang dinilai kurang bertanggungjawab atas kebebasannya, karena pers bisa mempengaruhi permbacanya. Hal tersebut yang diantisipasi oleh pemerintah agar masyarakat tidak terpelosok jauh dari haluan yang sudah diberikan oleh pemerintah akibat tidak tanggungjawabnya pihak pers.

5. Akhir Kepemimpinan Soeharto

Prosesi lengsernya Presiden Soeharto dengan paksaan dari berbagai pihak untuk mengundurkan diri memberikan kesan pahit bagi Soeharto. Segala jeri payahnya untuk memberikan kontribusi juga melaksanakan pembangunan bagi negeri berakhir tragis di tangan putra putri bangsanya sendiri. Hampir dari seluruh elemen masyarakat pada kala itu mengharapkan pergantian presiden, melakukan reformasi bagi negara Indonesia demi mencapai perubahan yang diharapkan.

Turunnya tahta sang ‘Smiling General’ tak terlepas dari kondisi Indonesia di akhir – akhir kepmimpinanya, dimana krisis melanda dunia, termasuk Indonesia. Krisis moneter Indonesia cukup buruk hingga pemerintah dibawah tangan Soeharto mengadakan kerja sama dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998, ditandatangani Nota Kesepahaman Kesepakatan (Letter of Intent) IMF dengan pemerintah Indonesia yang berjumlah 50 butir kesepakatan yang harus dilaksanakan Firdaus (2008).

Kebutuhan pokok terus meningkat beriringan dengan kenaikan nilai tukar dollar juga harga pokok, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi keberlangsungan masyarakat agar bisa terus memenuhi kebutuhan di tengah krisis global.

Operasi pasar dilakukan pemerintah demi meringankan beban masyarakat bawah, akan tetapi masih kurang untuk bisa mengatasi krisis global yang melanda negara Indonesia. Oleh sebab itu kerjasama dengan IMF dilakukan demi membantu mengatasi krisis yang melanda Indonesia.

Harmoko dalam Firdaus 2008 mengungkapkan “ Kegagalan politik Presiden Soeharto, yang demikian terbuka menerima bantuan dari pihak asing, terutama negara Adidaya, adanya ketergantungan akan bantuan yang diterima selama ini, Bangsa Indonesia telah masuk dalam “mulut Harimau”. Bangsa Indonesia di-*telan* dan “dipermainkan” dalam disain kapitalis agar tidak menjadi sebuah negara yang kuat, disegani dan mandiri.

Kemudian kita masuk dalam “mulut Buaya;” uluran tangan IMF (sekali lagi bantuan dari negara asing itu), ternyata kita semakin terpuruk, ‘alias’ masuk ke mulut Buaya.” Indonesia gagal dalam menghambat juga mengatasi krisis, bantuan dari IMF semakin membuat terpuruk dengan segala kesepakatan yang ada didalamnya.

Dari krisis inilah masyarakat menilai bahwa sudah saatnya bagi Indonesia untuk segera melakukan reformasi juga memperbaiki bangsa demi terus terjaganya generasi selanjutnya. Tidak hanya itu, isu HAM menggemakan hingga semakin membuat Soeharto terpuruk.

HAM diperbincangkan oleh berbagai elemen, terlebih lagi mahasiswa yang menuntut kebebasan dalam negara, yang dinilai tidak mencerminkan demokrasi. Semakin besar dorongan yang ditujukan oleh masyarakat untuk meminta Soeharto segera turun tahta.

Pada bulan Mei pecah demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia, banyak korban berjatuh di kalangan demonstran. Mahasiswa – mahasiswa hilang, hingga tewas karena peluru tajam, dan lain sebagainya.

Kerusuhan yang memicu amarah seluruh elemen masyarakat akhirnya menimbulkan gelombang demonstrasi besar – besaran di Indonesia, yang dilakukan di berbagai wilayah dan berpusat di Ibukota Negara.

Segala upaya telah dilakukan oleh para demonstran demi bisa merubah Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Hingga akhirnya

menduduki gedung DPR-MPR oleh para demonstran. Gedung dipenuhi, diduduki oleh mahasiswa yang menuntut reformasi.

Hingga pada akhirnya tanggal 21, Mei 1998 Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Indonesia. Diwaktu yang sama, pembangunan dibawah tangan sang Jendral terhenti langkahnya dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang reformis.

Pemahaman dari pemikiran Soeharto di analisis dalam bentuk tabel menurut Hadi (2008:92) juga menyebutkan bahwa inti dari Hermetik Dilthey mencangkup konsep segitiga yaitu, Erlebnis (pengalaman yang hidup), Ausdruck (ungkapan), dan Verstehen (pemahaman). Konsep pertama pada teori Dilthey adalah Erlebnis yang berarti “mengalami” Palmer (2005:107) sebagai berikut;

No.	Ausdruck	Verstehen	Erlebnis
1	Sikap Mental	Satu hal yang perlu sangat diperhatikan adalah, bahwa di-samping pembersihan kedalam, kita juga harus dapat merubah sikap mental kita sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Nasional yang bulat, berdasarkan	Penataran P4 adalah salahsatu program yang diusung Soeharto untuk merealisasikan Sikap Mental.

		<p>konsensus Nasio-nal jang telah kita tjapai bersama</p>	
2	Persatuan	<p>Agar setiap golongan dapat memberikan sumbang-annja jang positif bagi persatuan dan pembangunan Bangsa kita, maka golongan-golongan itupun harus bersatu dan harus mempunjai program kerdja jang djelas dalam rangka program Nasional</p>	<p>Penyederhanaan Partai ialah salah satu bentuk penghayatan dari pemikiran Persatuan Soeharto</p>
3	Politik Bebas Aktif	<p>Sementara kita sibuk dengan urusan-urusan dalam jang masih</p>	<p>Kembalinya Indonesia kedalam PBB adalah bentuk Penghayatan</p>

		<p>banjak itu, kitapun tidak memalingkan muka dari masalah-masalah dunia. Prinsip-prinsip politik luar negeri kita jang bebas aktif itulah jang selalu kita pegang teguh dalam pengembangan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat didunia ini.</p>	<p>dari Politik Bebas Aktif</p>
4	Stabilitas Ekonomi	<p>Diarahkan untuk membulatkan usaha reha-bilitasi dan stabilisasi ekonomi untuk meletakkan batu-batu terachir dalam mempersiapkan landasan pembangunan.</p>	<p>Bentuk dari Politik Bebas Aktif, pengaturan Moneter Negara</p>
5	Stabilitas Politik	<p>Politik tidak boleh</p>	<p>Himbauan Pemerintah</p>

		mengganggu pembangunan	agar tidak terlalu memperbesar isu Pemilu.
6	Pendidikan	Dasar dan arah pendidikan itu haruslah berkembangkannya warga negara yang meresapi dasar negaranya Pantja Sila, yang sehat badan dan tjerdas fikiran-nja, yang memiliki inisiatif dan demokratis, yang bermoral tinggi dan berwatak kuat, yang bertanggung-djawab kepada Bangsa dan pembangunan selanjutnya.	Pendidikan Harus Berdasarkan Pancasila yang dimana P4 juga masuk sebagai landasan agar pendidikan tidak melenceng dari dasar negara

Tabel 4.2 Sumber dari pidato – pidato kenegaraan Soeharto

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembangunan Nasional pada masa Orde Baru dimulai dari tahun 1969, namun rencana pembangunan telah di sampaikan kepada khalayak DPR-GR dari tahun 1968. Pembangunan yang dilakukan pada masa berjalannya Orde Baru di paparkan secara ringkas dalam bentuk Pidato Kenegaraan pada tahun 1968-1971, pada selang waktu empat tahun tersebut beberapa uraian dan juga ide mengenai pembangunan nasional disampaikan oleh Soeharto. Dalam pidato 1968-1971 Soeharto menyampaikan perihal – perihal mengenai pembangunan berskala nasional.

a. Tahun 1968

Tahun 1968 bisa di katakan sebagai cikal bakal pembangunan nasional, karena pada tahun ini Soeharto mulai memaparkan perihal mengenai Pembangunan Nasional. Pada tahun ini Soeharto menyampaikan dalam pidato kenegaraannya mengenai tindakan – tindakan yang harus segera dilaksanakan negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan dalam negeri.

Pembangunan Nasional mulai disampaikan kepada DPR-GR dalam Pidato Kenegaraan. Pada tahun ini dalam pidato nya Soeharto beberapa kali menyampaikan kesiapan masyarakat dan

juga seluruh golongan untuk mempersiapkan pembangunan. Rencana pembangunan sudah matang dan juga bisa segera dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

b. Tahun 1969

Pada tahun 1969 dalam Pidato Kenegaraan Soeharto memfokuskan pada persatuan. Di tahun 1969 Soeharto menyampaikan di depan DPR-GR bahwa langkah awal untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah persatuan. Dalam hal ini persatuan yang di titik beratkan oleh Soeharto ialah persatuan sikap dalam menghadapi Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh negara. Soeharto menghimbau agar segala golongan tidak mementingkan kehendak masing – masing, akan tetapi bersatu demi melancarkan pembangunanan nasional.

c. Tahun 1970

Pada Tahun ini Soeharto memfokuskan pembahasan pembangunan dalam hal Stabilitas Politik. Stabilitas Politik menjadi perhatian dikarenakan agenda pemilu. Soeharto pada tahun ini menyampaikan pentingnya setiap golongan menjaga stabilitas politik agar tidak mengganggu Pembangunan Nasional. Pada tahun ini Soeharto menyampaikan mengenai ABRI yang akan diperbantukan demi menjaga stabilitas Politik dalam sistem Dwifungsi ABRI.

d. Tahun 1971

Pada tahun ini Soeharto menyiapkan hal – hal lain untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tahun 1971 Soeharto masih memfokuskan pada stabilitas politik karena pasca Pemilu, namun juga memberikan perhatian lebih pada Stabilitas ekonomi dan hasil Ekspor sebagai hasil dari kebijakan Politik luar negeri Indonesia.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada dua pihak, pihak yang pertama yaitu kepada para akademisi, penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengkaji pemikiran-pemikiran politik pembangunan dari Soeharto. Sehingga diharapkan para akademisi dapat memperdalam kajian-kajian mengenai pemikiran-pemikiran Soeharto pada masa yang akan datang.

Kedua yaitu kepada para pemimpin bangsa saat ini, supaya menilik kembali pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh nasional seperti Soeharto tentang pembangunan Sosial, Ekonomi, Politik dalam kemajuan dan perkembangan Indonesia serta hubungannya dengan politik Indonesia. Para pemimpin bangsa saat ini juga perlu mencontoh sikap Soeharto yang sangat menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Leftwich. 2000. *States of Development: on the Primacy of Politics in Development*. Cambridge: Polity Press.
- Darma, Y. A. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Darma, Y. A. 2014. *Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif*. Bandung: Refika Aditama
- Dwipayana. 1989. *SOEHARTO Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta : PT Citra Lamtoro Gung Persada
- Hadi, Abdul. 2008. *Hermeneutika Sastra Barat dan Timur*. Jakarta: Depdiknas.
- Halliday, M. A. K dan Hasan, R. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Harahap, S. 2014. *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*. Jakarta : Prenada
- Inglehart dan Welzel. 2005. *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge : Cambridge University Press
- Jamaludin, A.N. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Jorgensen W. dan Louise J. 2007. *Analisis Wacana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moeloeng. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moeloeng, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya

- Palmer, Richard E. 2005. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* terjemahan Munsur Hery dan Damanhuri Mohammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rostow, Walt. W. 1960. *The Stages of Economic Growth. A-non Communist Manifesto*. London : Cambridge University Press.
- Santrock, J.W 2011. *Life-Span Development: Perkembangan Masa-Hidup*. Edisi 13. Jilid 1. Alih Bahasa: Widyasinta Benedictine. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : proses, masalah dan dasar kebijaksanaan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI
- Surbakti, Ramlan. 1992. "*Memahami Ilmu Politik*". Jakarta: PT. Grasindo
- Suroso. 2002. *Bahasa Jurnalistik Perspektif Berita Utama Politik dalam Surat Kabar Indonesia pada Awal Reformasi*. Jakarta: UNJ, 2002
- Syam, Firdaus. 2008. *Berhentinya Soeharto Fakta dan Kesaksian Harmoko*. Jakarta : PT Metro Pos
- Tambunan, A.S. 1995. *Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Perannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Winarno, Budi, 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: MedPress.

Lampiran 1
Instrumen Penelitian

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Pengumpulan Data	Objek
1.	Bagaimana pemikiran Soeharto tentang Pembangunan bangsa Indonesia dalam pidatonya?	Mengidentifikasi pemikiran Soeharto tentang pembangunan bangsa Indonesia di dalam pidatonya	<p>1. Latar belakang Soeharto</p> <p>Latar belakang kehidupan Soeharto dari kecil hingga menjabat sebagai presiden RI ke-2</p> <p>2. Latar belakang pemikiran Soeharto</p> <p>Hal - hal yang melatarbelakangi pemikiran</p>	<p>1. Data Primer</p> <p>A. Pengumpulan data berupa latar belakang kehidupan Soeharto yang bisa menjadi sumber data utama, berupa buku Biografi Soeharto.</p> <p>B. Pengumpulan data selanjutnya untuk menemukan latar belakang pemikiran Soeharto tentang pembangunan di Indonesia, sumber data</p>	<p>1. Buku Otobiografi Soeharto.</p> <p>2. Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968.</p> <p>3. Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1969.</p> <p>4. Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1970.</p>

			Soeharto tentang pembangunan bagi bangsa Indonesia	yang diperlukan ialah Buku Biografi Soeharto	5. Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1971.
			3. Pidato Kenegaraan Soeharto tentang Pembangunan Mengolah makna pemikiran Soeharto tentang pembangunan bagi bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Soeharto di depan DPR-	C. Pengumpulan data selanjutnya ialah Pidato Kenegaraan Soeharto pada kurun waktu 1968-1971. 2. Data Sekunder A. Pengumpulan data Sekunder dari pendapat orang tentang Soeharto pada masa kepemimpinannya sebagai presiden Indonesia, sumber data yang diperlukan ialah buku -	6. Buku - buku lain tentang Soeharto. 7. Jurnal tentang pemikiran Soeharto.

			MPR pada tahun 1968-1971..	<p>buku tentang Soeharto dan juga karya tulis mengenai Soeharto.</p> <p>B. Pengumpulan Data Sekunder tentang pemikiran Soeharto, yang terlampir pada buku mengenai Soeharto pada saat memimpin Indonesia, sumber data ialah buku mengenai Soeharto.</p>	
2.	Bagaimana perkembangan pembangunan Indonesia di era kepemimpinan Soeharto?	Mengidentifikasi perkembangan pembangunan Indonesia pada era Kepemimpinan	1. Pembangunan di Indonesia Mendata hal-hal mengenai pembangunan	1. Data Primer A. Pengumpulan data mengenai pembangunan Indonesia pada masa kepemimpinannya saat	

		n Soeharto	n di Indonesia pada masa kepemimpin an Soeharto 2. Perkembang an Pembanguna n Mengolah data perkembang an Pembanguna n pada masa kepemimpin an Soeharto. 3. Faktor Perkembang an Faktor perkembang an ekonomi Indonesia pada masa kepemimpin	menjabat menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia, sumber data buku tentang pembangunan Indonesia. B. Pengumpulan data tentang perkembangan pembangunan di Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto menjabat presiden. C. Mengolah data tentang faktor - faktor apa saja yang menyebabkan pesatnya perkembangan Pembangunan yang ada di	
--	--	------------	---	---	--

			<p>an Soeharto.</p> <p>4. Faktor Pendukung</p> <p>Hal - hal lain pendukung perkembangan ekonomi Indonesia.</p>	<p>Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto menjabat menjadi Presiden RI ke-2, sumber data buku mengenai Kepemimpinan Soeharto.</p> <p>D. Mengolah data mengenai faktor - faktor lain yang mampu menyebabkan perkembangan di Indonesia menjadi lebih baik, sumber data buku, dan juga jurnal mengenai Soeharto.</p>	
--	--	--	--	--	--

Lampiran 2

Foto : Pidato Kenegaraan Soeharto Tahun 1968-1971

